



PUTUSAN

Nomor 30/PID/2020/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : BUDIK WAHYOEDI bin HARSONO;
Tempat lahir : Pangkalpinang;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 16 April 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Tomat III Nomor 83 Rt. 05 Rw. 02, Kel. Melintang, Kec. Rangkui, Kota Pangkalpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bendahara Pengeluaran DPRD/ Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang/ saat ini sopir;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pangkalpinang, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
6. Penahanan Hakim oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;

Halaman 1 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 30/Pid /2020/PT.BBL Tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa BUDIK WAHYOEDI BIN HARSONO tersebut di atas;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 30/Pid /2020/PT.BBL Tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan Hari Sidang
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 90 /Pid. B/2020/PN.PGP Tanggal 4 Juni 2020 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BUDIK WAHYOEDI bin HARSONO selaku Bendahara Pengeluaran DPRD/Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 22/KEP/BAKEUDA/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 dan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 257/KEP/BAKEUDA/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017 atau



setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (dahulu adalah Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) sebesar Rp355.496.640,00 (tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni dilakukan Terdakwa BUDIK WAHYOEDI bin HARSONO pada tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa BUDIK WAHYOEDI Bin HARSONO BUDIK WAHYOEDI Bin HARSONO diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran DPRD/Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 22/KEP/BAKEUDA/II/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 dan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 257/KEP/BAKEUDA/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa Terdakwa BUDIK WAHYOEDI Bin HARSONO sebagai Bendahara Pengeluaran DPRD/Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP LS;



- b. Menerima dan menyimpan uang persediaan serta melakukan pembayaran dengan Uang Persediaan yang dikelolanya;
- c. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah);
- d. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan keperbendaharaan selaku Bendahara pada SKPD.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Penghitungan Kerugian Pada Pendapatan Negara dan Ahli Peraturan Perpajakan FATWA FURQANA, SE, MBA, Terdakwa BUDIK WAHYOEDI Bin HARSONO BUDIK WAHYOEDI Bin HARSONO selaku Bendahara Pengeluaran DPRD/Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang juga mempunyai kewajiban dalam kaitannya dengan Pajak Penghasilan yaitu:
 - a. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU PPh dijelaskan bahwa Bendahara wajib memotong, menyetor dan melaporkan pajak atas penghasilan yang dibayar kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
 - b. Sesuai Pasal 22 ayat (1) UU PPh dijelaskan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
 - c. Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf c UU PPh Bendaharawan pemerintah wajib memotong, menyetor dan melaporkan pajak atas penghasilan yang dibayar kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) untuk pembayaran sewa sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan jasa tehnik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
 - d. Sesuai Pasal 4 ayat (2) UU PPh Bendaharawan pemerintah wajib memotong, menyetor dan melaporkan pajak atas penghasilan tertentu lainnya yang pajaknya bersifat final yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan pemerintah yang dibayar kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT).
 - e. Sesuai Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.03/2014 tanggal 24 Desember 2014: PPh Pasal 21 yang dipotong



oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

f. Sesuai Pasal 2 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.03/2014 tanggal 24 Desember 2014: PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara.

- Bahwa Terdakwa BUDIK WAHYOEDI Bin HARSONO selaku Bendahara Pengeluaran DPRD/Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang juga melakukan tugas dan tanggungjawab melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pembayaran gaji/upah/tunjangan/ honorarium Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang dan melakukan penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong tersebut ke Kas Negara.
- Bahwa dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, Terdakwa BUDIK WAHYOEDI Bin HARSONO selaku Bendahara Pengeluaran DPRD/Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang telah memiliki dan mempergunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu NPWP 00.002.381.2-304.000 atas nama BENDAHARA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KODYA DATI II PANGKALPINANG.
- Bahwa selama melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Bendahara Pengeluaran DPRD/Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang ditahun 2017 Terdakwa BUDIK WAHYOEDI Bin HARSONO telah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pembayaran kegiatan:
 - a. Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Kota Pangkalpinang;
 - b. Tambahan Penghasilan CPNS/PNS Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang;
 - c. Honorarium CPNS/PNS/Pegawai Honorer/Pelaksana Kegiatan/Tenaga Ahli Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang;
 - d. Insentif CPNS/PNS.
- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa BUDIK WAHYOEDI Bin HARSONO Pencairan Dana terkait dengan pembayaran gaji/tunjangan/tambahan penghasilan/honorarium dilakukan dengan cara:
 - a. Terdakwa selaku Bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) secara berbarengan dengan menggunakan Aplikasi Keuangan (SIMDA);



- b. Terdakwa yang menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan form CheckList yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan apabila isian Form sudah lengkap;
- c. Yang menandatangani Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) adalah Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang, kemudian yang mengantarkan dokumen SPM tersebut untuk ditandatangani kadang-kadang Terdakwa sendiri dan kadang-kadang Staf Keuangan;
- d. Kemudian setelah SPM ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, berkas pengajuan pencairan dana (SPP dan SPM) diantar ke BAKEUDA oleh Terdakwa sendiri untuk proses penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
- e. Setelah SP2D diterbitkan oleh BAKEUDA (Badan Keuangan Daerah) Kota Pangkalpinang, BAKEUDA mengirimkan SP2D tersebut ke Bank Sumsel, sedangkan berkas pengajuan yang sudah diterbitkan SP2D, Terdakwa sendiri yang mengambilnya ke Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang;
- f. Setelah ada dana/uang masuk atas pencairan SP2D, Terdakwa menyiapkan Cek Penarikan Tunai yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa sendiri pun yang mencairkan seluruh dana tersebut.
- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dicairkan tersebut, uangnya masuk ke rekening atas nama Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang dengan Nomor Rekening: 144.301.0029 pada Bank Sumsel Babel selanjutnya Terdakwa BUDIK WAHYOEDI Bin HARSONO mengambil uang tersebut kemudian melakukan pembayaran gaji/tunjangan/tambahan penghasilan/honorarium kepada para penerima secara bersih (sudah dipotong PPh Pasal 21).
- Bahwa Terdakwa BUDIK WAHYOEDI Bin HARSONO tidak menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong/dipungut oleh Terdakwa BUDIK WAHYOEDI Bin HARSONO selama menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran DPRD/Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 tersebut ke kas negara, melainkan Terdakwa BUDIK WAHYOEDI Bin HARSONO penggunaan uang PPh Pasal 21 tersebut untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dicairkan Terdakwa dan PPh Pasal 21 telah dipotong/dipungut namun tidak disetor oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terhadap 10 (sepuluh) SP2D sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017 yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Sub Unit Organisasi	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Keperluan Untuk	PPH Pasal 21 yang telah dipotong namun tidak disetorkan ke Kas Negara (Rp)
1	DPRD	0674/SP2 D-BTL/4.0 1.01.01/2 017	01/03/2017	Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD bulan Maret 2017	71.344.520
2	DPRD	1146/SP2 D-BTL/4.0 1.01.01/2 017	04/04/2017	Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD bulan April 2017	71.344.520
3	DPRD	1751/SP2 D-BTL/4.0 1.01.01/2 017	02/05/2017	Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD bulan Mei 2017	71.344.520
4	DPRD	2333/SP2 D-BTL/4.0 1.01.01/2 017	02/06/2017	Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Kota Pangkalpinang bulan Juni 2017	71.344.520
5	DPRD	3027/SP2 D-BTL/4.0 1.01.01/2 017	16/06/2017	Pembayaran Tunjangan Hari Raya Anggota DPRD Kota Pangkalpinang periode 2014-2019	19.520
6	DPRD	3226/SP2 D-BTL/4.0 1.01.01/2 017	03/07/2017	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD bulan Juli 2017	68.899.520
7	DPRD	3331/SP2 D-BTL/4.0 1.01.01/2 017	04/07/2017	Pembayaran Gaji 13 Anggota DPRD bulan Juni 2017	19.520
8	Sekretariat DPRD	1462/SP2 D-BL/4.01 .04.01/20 17	11/04/2017	Honorarium Pengelola Keuangan bulan Januari s.d. Maret 2017	465.000



9	Sekretariat DPRD	3901/SP2 D-BL/4.01 .04.01/20 17	02/08/2017	Honorarium Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	465.000
10	Sekretariat DPRD	6559/SP2 D-BL/4.01 .04.01/20 17	24/11/2017	Honorarium non PNS - Uang Transport Fasilitas Penyelenggara Budaya Daerah	250.000
Jumlah					355.496.640

- Bahwa Terdakwa BUDIK WAHYOEDI Bin HARSONO mengetahui jika batas waktu penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kas Negara adalah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak melakukan penyetoran PPh Pasal 21 yang Terdakwa potong/pungut tersebut walaupun telah dilakukan himbauan oleh Kantor Pajak Pratama Pangkalpinang.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Penghitungan Kerugian Pada Pendapatan Negara dan Ahli Peraturan Perpajakan FATWA FURQANA, SE, MBA, akibat perbuatan Terdakwa BUDIK WAHYOEDI Bin HARSONO yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut telah mengakibatkan kerugian pada Pendapatan Negara sebesar Rp 355.496.640,- (tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa BUDIK WAHYOEDI Bin HARSONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;



Menimbang, bahwa, oleh Jaksa/ Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDIK WAHYOEDI Bin HARSONO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIK WAHYOEDI Bin HARSONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda 2 (dua) kali Kerugian Pendapatan Negara (KPN) sebesar Rp355.496.640,00 (tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) = sebesar Rp710.993.280,00 (tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian di lelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan dan dengan perintah TERDAKWA tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0007/SP2D-BTL/1.20.01.01/2017 tanggal 16 Januari 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 1 (satu) lembar.
 2. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0077/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 01 Februari 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 1 (satu) lembar.
 3. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0674/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 01 Maret 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 1 (satu) lembar.
 4. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1146/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 04 April 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 1 (satu) lembar.
5. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1751/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 02 Mei 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 1 (satu) lembar.
6. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2333/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 02 Juni 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 1 (satu) lembar.
7. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3027/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 48004520 sebanyak 1 (satu) lembar.
8. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3226/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 03 Juli 2017 nilai Rp 596340665 sebanyak 1 (satu) lembar.
9. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3331/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 04 Juli 2017 nilai Rp 118878470 sebanyak 1 (satu) lembar.
10. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4021/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 04 Agustus 2017 nilai Rp 593952145 sebanyak 1 (satu) lembar.
11. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4749/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 07 September 2017 nilai Rp 597153565 sebanyak 1 (satu) lembar.
12. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5010/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 983100000 sebanyak 1 (satu) lembar.
13. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5077/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 02 Oktober 2017 nilai Rp 37355150 sebanyak 1 (satu) lembar.
14. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5149/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 03 Oktober 2017 nilai Rp 1124490540 sebanyak 1 (satu) lembar.
15. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5892/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 01 November 2017 nilai Rp 1113400065 sebanyak 1 (satu) lembar.
16. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7191/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 07 Desember 2017 nilai Rp 1113400065 sebanyak 1 (satu) lembar.
17. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8268/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 22 Desember 2017 nilai Rp

Halaman 10 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 315000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
18. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0055/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 01 Februari 2017 nilai Rp 131389600 sebanyak 1 (satu) lembar.
19. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0102/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp 7295389 sebanyak 1 (satu) lembar.
20. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0132/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 03 Februari 2017 nilai Rp 31364268 sebanyak 1 (satu) lembar.
21. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0133/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 03 Februari 2017 nilai Rp 24895823 sebanyak 1 (satu) lembar.
22. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0134/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 03 Februari 2017 nilai Rp 26936890 sebanyak 1 (satu) lembar.
23. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0135/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 03 Februari 2017 nilai Rp 37791646 sebanyak 1 (satu) lembar.
24. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0136/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 03 Februari 2017 nilai Rp 59687469 sebanyak 1 (satu) lembar.
25. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0137/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 03 Februari 2017 nilai Rp 49232713 sebanyak 1 (satu) lembar.
26. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0362/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 09 Februari 2017 nilai Rp 67400000 sebanyak 1 (satu) lembar.
27. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0600/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 01 Maret 2017 nilai Rp 131389600 sebanyak 1 (satu) lembar.
28. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0850/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 06 Maret 2017 nilai Rp 67400000 sebanyak 1 (satu) lembar.
29. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0988/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Maret 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
30. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0989/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Maret 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 11 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0990/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Maret 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
32. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0991/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Maret 2017 nilai Rp 24719024 sebanyak 1 (satu) lembar.
33. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0992/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Maret 2017 nilai Rp 12495823 sebanyak 1 (satu) lembar.
34. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0993/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Maret 2017 nilai Rp 18991646 sebanyak 1 (satu) lembar.
35. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1091/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 03 April 2017 nilai Rp 131389600 sebanyak 1 (satu) lembar.
36. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1396/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 10 April 2017 nilai Rp 67400000 sebanyak 1 (satu) lembar.
37. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1462/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 11 April 2017 nilai Rp 6600000 sebanyak 1 (satu) lembar.
38. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1492/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 12 April 2017 nilai Rp 90000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
39. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1589/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 April 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
40. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1590/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 April 2017 nilai Rp 18991646 sebanyak 1 (satu) lembar.
41. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1591/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 April 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
42. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1592/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 April 2017 nilai Rp 12495823 sebanyak 1 (satu) lembar.
43. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1593/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 April 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
44. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1594/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 April 2017 nilai Rp 24719024 sebanyak 1 (satu) lembar.
45. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1728/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Mei 2017 nilai Rp 131389600 sebanyak 1 (satu) lembar.
46. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1879/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 08 Mei 2017 nilai Rp 67400000 sebanyak 1 (satu) lembar.
47. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2168/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 nilai Rp 18991646 sebanyak 1 (satu) lembar.
48. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2169/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
49. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2170/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
50. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2171/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 nilai Rp 23019024 sebanyak 1 (satu) lembar.
51. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2172/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
52. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2173/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 nilai Rp 12495823 sebanyak 1 (satu) lembar.
53. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2277/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Juni 2017 nilai Rp 132308930 sebanyak 1 (satu) lembar.
54. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2577/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 07 Juni 2017 nilai Rp 67400000 sebanyak 1 (satu) lembar.
55. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3012/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 100434800 sebanyak 1 (satu) lembar.
56. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3083/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 26036890 sebanyak 1 (satu) lembar.
57. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3084/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 33927957

Halaman 13 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebanyak 1 (satu) lembar.
58. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3085/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 30764268
- sebanyak 1 (satu) lembar.
59. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3086/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 45982713
- sebanyak 1 (satu) lembar.
60. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3087/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 56237469
- sebanyak 1 (satu) lembar.
61. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3088/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 21245823
- sebanyak 1 (satu) lembar.
62. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3262/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 03 Juli 2017 nilai Rp 132482482
- sebanyak 1 (satu) lembar.
63. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3308/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 04 Juli 2017 nilai Rp 124897834
- sebanyak 1 (satu) lembar.
64. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3620/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 17 Juli 2017 nilai Rp 67400000
- sebanyak 1 (satu) lembar.
65. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3724/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 21 Juli 2017 nilai Rp 90000000
- sebanyak 1 (satu) lembar.
66. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3746/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 24732713
- sebanyak 1 (satu) lembar.
67. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3747/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 15764268
- sebanyak 1 (satu) lembar.
68. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3748/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 12495823
- sebanyak 1 (satu) lembar.
69. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3749/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 17677957
- sebanyak 1 (satu) lembar.
70. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3750/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 29987469
- sebanyak 1 (satu) lembar.



71. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3751/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
72. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3814/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 01 Agustus 2017 nilai Rp 136780611 sebanyak 1 (satu) lembar.
73. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3901/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Agustus 2017 nilai Rp 6600000 sebanyak 1 (satu) lembar.
74. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4020/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 04 Agustus 2017 nilai Rp 69250000 sebanyak 1 (satu) lembar.
75. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4313/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Agustus 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
76. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4314/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Agustus 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
77. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4315/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Agustus 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
78. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4316/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Agustus 2017 nilai Rp 17677957 sebanyak 1 (satu) lembar.
79. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4334/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Agustus 2017 nilai Rp 24732713 sebanyak 1 (satu) lembar.
80. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4348/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 28 Agustus 2017 nilai Rp 60000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
81. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4349/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 28 Agustus 2017 nilai Rp 11095823 sebanyak 1 (satu) lembar.
82. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4473/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 04 September 2017 nilai Rp 137090431 sebanyak 1 (satu) lembar.
83. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4812/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 12 September 2017 nilai Rp 69250000 sebanyak 1 (satu) lembar.
84. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5029/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
85. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5030/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 18991646 sebanyak 1 (satu) lembar.
86. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5031/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 11395823 sebanyak 1 (satu) lembar.
87. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5032/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
88. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5033/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
89. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5034/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 24732713 sebanyak 1 (satu) lembar.
90. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5095/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Oktober 2017 nilai Rp 137671983 sebanyak 1 (satu) lembar.
91. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5355/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 09 Oktober 2017 nilai Rp 69250000 sebanyak 1 (satu) lembar.
92. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5524/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Oktober 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
93. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5525/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Oktober 2017 nilai Rp 11695823 sebanyak 1 (satu) lembar.
94. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5526/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Oktober 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
95. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5527/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Oktober 2017 nilai Rp 20305335 sebanyak 1 (satu) lembar.
96. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5528/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Oktober 2017 nilai Rp 24732713 sebanyak 1 (satu) lembar.
97. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5529/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Oktober 2017 nilai Rp

Halaman 16 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
98. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5796/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 01 November 2017 nilai Rp 137906061 sebanyak 1 (satu) lembar.
99. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6337/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 13 November 2017 nilai Rp 67500000 sebanyak 1 (satu) lembar.
100. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6554/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 November 2017 nilai Rp 28673780 sebanyak 1 (satu) lembar.
101. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6555/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 November 2017 nilai Rp 23419024 sebanyak 1 (satu) lembar.
102. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6556/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 November 2017 nilai Rp 12223201 sebanyak 1 (satu) lembar.
103. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6557/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 November 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
104. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6558/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 November 2017 nilai Rp 11695823 sebanyak 1 (satu) lembar.
105. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6559/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 November 2017 nilai Rp 5000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
106. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6621/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 November 2017 nilai Rp 31101158 sebanyak 1 (satu) lembar.
107. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6806/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 04 Desember 2017 nilai Rp 130974858 sebanyak 1 (satu) lembar.
108. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6821/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 04 Desember 2017 nilai Rp 3681431 sebanyak 1 (satu) lembar.
109. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7604/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 nilai Rp 32414847 sebanyak 1 (satu) lembar.
110. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7605/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 nilai Rp 11695823 sebanyak 1 (satu) lembar.



111. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7606/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 nilai Rp 12223201 sebanyak 1 (satu) lembar.
112. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7607/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
113. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7608/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 nilai Rp 23419024 sebanyak 1 (satu) lembar.
114. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7609/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 nilai Rp 28673780 sebanyak 1 (satu) lembar.
115. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7629/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 13 Desember 2017 nilai Rp 700000 sebanyak 1 (satu) lembar.
116. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7866/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Rp 12700000 sebanyak 1 (satu) lembar.
117. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8028/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Rp 120000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
118. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 80.29/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Rp 1313689 sebanyak 1 (satu) lembar.
119. Foto.kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8030./SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Rp 67500000 seban.yak 1 (satu) lembar.
120. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8031/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Rp 67500000 sebanyak 1 (satu) lembar.
121. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8501/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 nilai Rp 2220000 sebanyak 1 (satu) lembar.
122. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8502/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 nilai Rp 1350000 sebanyak 1 (satu) lembar.
123. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8503/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 nilai Rp 1510000 sebanyak 1 (satu) lembar.
124. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8504/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 nilai Rp 1170000 sebanyak 1 (satu) lembar.
125. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8505/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 nilai Rp 1440000 sebanyak 1 (satu) lembar.
126. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8585/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 nilai Rp 1390000 sebanyak 1 (satu) lembar.
127. Print-Out Rekening Rekening Giro Dinas Pemda (Bank Sumsel Babel) atas nama DPRD Kota PKP nomor rekening 1443010029 (IDR) periode 01 Jan 2017 s/d 31 Des 2017 sebanyak 8 (delapan) lembar.
128. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 345008 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
129. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 345009 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
130. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. 345010, no. CD 405212, dan no. CD 527217 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
131. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405211 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
132. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405213, no. CD 527221, dan no. CD 610432 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
133. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405216 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
134. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405219 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
135. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405220, no. CD 527223, dan no. CD 527225 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
136. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor

Halaman 19 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405711, no. CD 405718, dan no. CD 527228 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
137. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405712, no. CD 405725, dan no. CD 611157 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
138. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405713 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
139. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405715 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
140. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405716, no. CD 405727, dan no. CD 527216 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
141. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405717, no. CD 527211, dan no. CD 527212 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
142. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405719 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
143. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405720 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
144. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405721 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
145. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405722, no. CD 405723, dan no. CD 405724 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
146. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405726 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
147. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no.

Halaman 20 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CD 405728, no. CD 610440, dan no. CD 611151 beserta halaman validasi Bank sebanyak 2 (dua) lembar.
148. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405729, no. CD 610438, dan no. CD 611156 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
149. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 527213 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
150. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 527214 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
151. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 527215 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
152. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 527218 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
153. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 527219 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
154. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 527220 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
155. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 527222, no. CD 527224, dan no. CD 527229 beserta halaman validasi Bank sebanyak 2 (dua) lembar.
156. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 527226 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
157. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 527230 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
158. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 610433 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
159. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 14.43010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan

Halaman 21 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- no. CD 610434 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
160. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 610435 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
161. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 610436 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
162. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 611152 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
163. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 611153 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
164. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 611154 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
165. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 611159 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
166. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 611160 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
167. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 645161 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
168. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 645163 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
169. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 645164 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
170. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 645165 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
171. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 645167 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
172. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara

Halaman 22 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang
NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 09 Maret 2017 Jumlah Setor
Rp 1528506 nomor NTPN 408C02RJ7UBLGFR8 sebanyak 1 (satu)
lembar.
173. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN
NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang
NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 06 Juli 2017 Jumlah Setor
Rp 71344520 nomor NTPN AA1E911EASHV7RPO sebanyak 1 (satu)
lembar.
174. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN
NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang
NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 09 Maret 2017 Jumlah Setor
Rp 1528506 nomor NTPN 333AB2RJ9CTP7CR8 sebanyak 1 (satu)
lembar.
175. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN
NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang
NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 17 April 2017 Jumlah Setor
Rp 1528506 nomor NTPN A782758SOF3PSSH8 sebanyak 1 (satu)
lembar.
176. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN
NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang
NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 07 April 2017 Jumlah Setor
Rp 71344520 nomor NTPN 319DB21T1G46TMRO sebanyak 1 (satu)
lembar.
177. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN
NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang
NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 10 Mei 2017 Jumlah Setor
Rp 1528506 nomor NTPN E3C8D6NL7JV28BNO sebanyak 1 (satu)
lembar.
178. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN
NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 06 Juli 2017 Jumlah Setor Rp 4500000 nomor NTPN 7538811CJJ11DPO sebanyak 1 (satu) lembar.
179. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 06 Juli 2017 Jumlah Setor Rp 1569991 nomor NTPN F901A11D5KF03RPO sebanyak 1 (satu) lembar.
180. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 20 Juli 2017 Jumlah Setor Rp 1569991 nomor NTPN 2CF2D25FH30KRNGO sebanyak 1 (satu) lembar.
181. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 07 Agustus 2017 Jumlah Setor Rp 68805000 nomor NTPN 2D3ED3VNEFG5NL48 sebanyak 1 (satu) lembar.
182. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 29 Agustus 2017 Jumlah Setor Rp 3000000 nomor NTPN 697DF6FB0KHC4NV8 sebanyak 1 (satu) lembar.
183. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 19 September 2017 Jumlah Setor Rp 1509962 nomor NTPN 2296104V5PLCRSS8 sebanyak 1 (satu) lembar.
184. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 11 September 2017 Jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setor Rp 68974520 nomor NTPN 3CD2D7PLKOE0FO8 sebanyak 1 (satu) lembar.
185. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 19 September 2017 Jumlah Setor Rp 1509962 nomor NTPN E2EFD04UTKSO20S8 sebanyak 1 (satu) lembar.
186. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 19 September 2017 Jumlah Setor Rp 4500000 nomor NTPN 5F97B04UN807MQS8 sebanyak 1 (satu) lembar.
187. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 28 September 2017 Jumlah Setor Rp 147465000 nomor NTPN 08BA31PU8U1QCEO0 sebanyak 1 (satu) lembar.
188. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 03 Oktober 2017 Jumlah Setor Rp 146359520 nomor NTPN 6A1E62DMC37T0768 sebanyak 1 (satu) lembar.
189. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 03 Oktober 2017 Jumlah Setor Rp 4912500 nomor NTPN 58AF42DM963LID68 sebanyak 1 (satu) lembar.
190. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 02 November 2017 Jumlah Setor Rp 145707020 nomor NTPN 523875C1UI2CS3VO sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar.
191. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 11 Desember 2017 Jumlah Setor Rp 145707020 nomor NTPN B914509I3Q4M6SE8 sebanyak 1 (satu) lembar.
192. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 29 Desember 2017 Jumlah Setor Rp 3024162 nomor NTPN 2A40237M509T7D78 sebanyak 1 (satu) lembar.
193. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 29 Desember 2017 Jumlah Setor Rp 3014450 nomor NTPN 4BFE837M177JI878 sebanyak 1 (satu) lembar.
194. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 29 Desember 2017 Jumlah Setor Rp 6000000 nomor NTPN 8FE2137M86O5D078 sebanyak 1 (satu) lembar.
195. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 29 Desember 2017 Jumlah Setor Rp 900000 nomor NTPN B4AB637MBD6DIJ78 sebanyak 1 (satu) lembar.
196. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 29 Desember 2017 Jumlah Setor Rp 47250000 nomor NTPN D376037UBGQRI378 sebanyak 1 (satu) lembar.
197. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN

Halaman 26 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL



- NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Pengukapan Ketidakbenaran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 09 Agustus 2019 Jumlah Setor Rp 42000 nomor NTPN 4987F300SI42D26H sebanyak 1 (satu) lembar.
198. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Sanksi Administrasi pengungkap Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 09 Agustus 2019 Jumlah Setor Rp 63000 nomor NTPN B18FA12OD2CT6C0P sebanyak 1 (satu) lembar.
199. Fotokopi Surat Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang nomor 900/829/SETWAN/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 hal Tindak Lanjut hasil Temuan BPK RI sebanyak 5 (lima) lembar.
200. Fotokopi Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang nomor SP2DK-7171/WPJ.03/KP.06/2018 tanggal 12 Juli 2018 hal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan sebanyak 2 (dua) lembar.
201. Fotokopi Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang nomor S-26129/WPJ.03/KP.06/2018 tanggal 14 Agustus 2018 hal Permintaan Keterangan Data Wajib Pajak sebanyak 4 (empat) lembar.
202. Fotokopi Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang nomor SP2DK-3038/WPJ.03/KP.06/2019 tanggal 23 Mei 2019 hal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kedua atas temuan BPK RI Tahun Anggaran 2017 sebanyak 2 (dua) lembar.
203. Fotokopi Surat Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang nomor 900/721/Setwan/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 perihal Penjelasan atas temuan BPK RI terhadap Bendahara Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang sebanyak 4 (empat) lembar.
204. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0007/SP2D-BTL/1.20.01.01/2017 tanggal 16 Januari 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 1 (satu) lembar.
205. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0077/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 01 Februari 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 1 (satu) lembar.
206. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0674/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 01 Maret 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 1 (satu) lembar.
207. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1146/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 04 April 2017 nilai Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 617690605 sebanyak 1 (satu) lembar.
208. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1751/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 02 Mei 2017 nilai Rp
- 617690605 sebanyak 1 (satu) lembar.
209. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2333/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 02 Juni 2017 nilai Rp
- 617690605 sebanyak 1 (satu) lembar.
210. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3027/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp
- 48004520 sebanyak 1 (satu) lembar.
211. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3226/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 03 Juli 2017 nilai Rp
- 596340665 sebanyak 1 (satu) lembar.
212. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3331/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 04 Juli 2017 nilai Rp
- 118878470 sebanyak 1 (satu) lembar.
213. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4021/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 04 Agustus 2017 nilai Rp
- 593952145 sebanyak 1 (satu) lembar.
214. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4749/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 07 September 2017 nilai Rp
- 597153565 sebanyak 1 (satu) lembar.
215. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5010/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp
- 983100000 sebanyak 1 (satu) lembar.
216. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5077/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 02 Oktober 2017 nilai Rp
- 37355150 sebanyak 1 (satu) lembar.
217. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5149/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 03 Oktober 2017 nilai Rp
- 1124490540 sebanyak 1 (satu) lembar.
218. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5892/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 01 November 2017 nilai Rp
- 1113400065 sebanyak 1 (satu) lembar.
219. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7191/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 07 Desember 2017 nilai Rp
- 1113400065 sebanyak 1 (satu) lembar.
220. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8268/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 22 Desember 2017 nilai Rp
- 315000000 sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 28 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0055/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 01 Februari 2017 nilai Rp 131389600 sebanyak 1 (satu) lembar.
222. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0102/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp 7295389 sebanyak 1 (satu) lembar.
223. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0132/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 03 Februari 2017 nilai Rp 31364268 sebanyak 1 (satu) lembar.
224. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0133/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 03 Februari 2017 nilai Rp 24895823 sebanyak 1 (satu) lembar.
225. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0134/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 03 Februari 2017 nilai Rp 26936890 sebanyak 1 (satu) lembar.
226. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0135/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 03 Februari 2017 nilai Rp 37791646 sebanyak 1 (satu) lembar.
227. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0136/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 03 Februari 2017 nilai Rp 59687469 sebanyak 1 (satu) lembar.
228. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0137/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 03 Februari 2017 nilai Rp 49232713 sebanyak 1 (satu) lembar.
229. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0362/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 09 Februari 2017 nilai Rp 67400000 sebanyak 1 (satu) lembar.
230. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0600/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 01 Maret 2017 nilai Rp 131389600 sebanyak 1 (satu) lembar.
231. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0850/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 06 Maret 2017 nilai Rp 67400000 sebanyak 1 (satu) lembar.
232. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0988/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Maret 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
233. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0989/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Maret 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
234. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor

Halaman 29 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



- 0990/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Maret 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
235. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0991/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Maret 2017 nilai Rp 24719024 sebanyak 1 (satu) lembar.
236. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0992/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Maret 2017 nilai Rp 12495823 sebanyak 1 (satu) lembar.
237. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0993/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Maret 2017 nilai Rp 18991646 sebanyak 1 (satu) lembar.
238. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1091/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 03 April 2017 nilai Rp 131389600 sebanyak 1 (satu) lembar.
239. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1396/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 10 April 2017 nilai Rp 67400000 sebanyak 1 (satu) lembar.
240. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1462/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 11 April 2017 nilai Rp 6600000 sebanyak 1 (satu) lembar.
241. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1492/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 12 April 2017 nilai Rp 90000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
242. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1589/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 April 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
243. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1590/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 April 2017 nilai Rp 18991646 sebanyak 1 (satu) lembar.
244. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1591/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 April 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
245. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1592/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 April 2017 nilai Rp 12495823 sebanyak 1 (satu) lembar.
246. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1593/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 April 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
247. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1594/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 April 2017 nilai Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24719024 sebanyak 1 (satu) lembar.
248. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1728/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Mei 2017 nilai Rp 131389600 sebanyak 1 (satu) lembar.
249. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1879/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 08 Mei 2017 nilai Rp 67400000 sebanyak 1 (satu) lembar.
250. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2168/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 nilai Rp 18991646 sebanyak 1 (satu) lembar.
251. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2169/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
252. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2170/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
253. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2171/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 nilai Rp 23019024 sebanyak 1 (satu) lembar.
254. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2172/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
255. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2173/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 nilai Rp 12495823 sebanyak 1 (satu) lembar.
256. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2277/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Juni 2017 nilai Rp 132308930 sebanyak 1 (satu) lembar.
257. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2577/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 07 Juni 2017 nilai Rp 67400000 sebanyak 1 (satu) lembar.
258. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3012/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 100434800 sebanyak 1 (satu) lembar.
259. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3083/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 26036890 sebanyak 1 (satu) lembar.
260. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3084/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 33927957 sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 31 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3085/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 30764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
262. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3086/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 45982713 sebanyak 1 (satu) lembar.
263. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3087/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 56237469 sebanyak 1 (satu) lembar.
264. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3088/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 21245823 sebanyak 1 (satu) lembar.
265. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3262/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 03 Juli 2017 nilai Rp 132482482 sebanyak 1 (satu) lembar.
266. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3308/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 04 Juli 2017 nilai Rp 124897834 sebanyak 1 (satu) lembar.
267. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3620/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 17 Juli 2017 nilai Rp 67400000 sebanyak 1 (satu) lembar.
268. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3724/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 21 Juli 2017 nilai Rp 90000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
269. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3746/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 24732713 sebanyak 1 (satu) lembar.
270. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3747/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
271. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3748/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 12495823 sebanyak 1 (satu) lembar.
272. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3749/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 17677957 sebanyak 1 (satu) lembar.
273. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3750/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
274. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor

Halaman 32 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3751/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 13536890
sebanyak 1 (satu) lembar.
275. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor
3814/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 01 Agustus 2017 nilai Rp
136780611 sebanyak 1 (satu) lembar.
276. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor
3901/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Agustus 2017 nilai Rp
6600000 sebanyak 1 (satu) lembar.
277. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor
4020/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 04 Agustus 2017 nilai Rp
69250000 sebanyak 1 (satu) lembar.
278. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor
4313/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Agustus 2017 nilai Rp
29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
279. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor
4314/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Agustus 2017 nilai Rp
13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
280. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor
4315/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Agustus 2017 nilai Rp
15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
281. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor
4316/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Agustus 2017 nilai Rp
17677957 sebanyak 1 (satu) lembar.
282. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor
4334/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Agustus 2017 nilai Rp
24732713 sebanyak 1 (satu) lembar.
283. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor
4348/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 28 Agustus 2017 nilai Rp
60000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
284. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor
4349/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 28 Agustus 2017 nilai Rp
11095823 sebanyak 1 (satu) lembar.
285. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor
4473/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 04 September 2017 nilai Rp
137090431 sebanyak 1 (satu) lembar.
286. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor
4812/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 12 September 2017 nilai Rp
69250000 sebanyak 1 (satu) lembar.
287. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor
5029/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp

Halaman 33 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
288. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5030/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 18991646 sebanyak 1 (satu) lembar.
289. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5031/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 11395823 sebanyak 1 (satu) lembar.
290. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5032/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
291. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5033/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
292. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5034/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 24732713 sebanyak 1 (satu) lembar.
293. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5095/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Oktober 2017 nilai Rp 137671983 sebanyak 1 (satu) lembar.
294. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5355/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 09 Oktober 2017 nilai Rp 69250000 sebanyak 1 (satu) lembar.
295. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5524/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Oktober 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
296. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5525/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Oktober 2017 nilai Rp 11695823 sebanyak 1 (satu) lembar.
297. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5526/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Oktober 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
298. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5527/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Oktober 2017 nilai Rp 20305335 sebanyak 1 (satu) lembar.
299. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5528/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Oktober 2017 nilai Rp 24732713 sebanyak 1 (satu) lembar.
300. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5529/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Oktober 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 34 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5796/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 01 November 2017 nilai Rp 137906061 sebanyak 1 (satu) lembar.
302. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6337/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 13 November 2017 nilai Rp 67500000 sebanyak 1 (satu) lembar.
303. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6554/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 November 2017 nilai Rp 28673780 sebanyak 1 (satu) lembar.
304. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6555/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 November 2017 nilai Rp 23419024 sebanyak 1 (satu) lembar.
305. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6556/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 November 2017 nilai Rp 12223201 sebanyak 1 (satu) lembar.
306. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6557/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 November 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
307. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6558/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 November 2017 nilai Rp 11695823 sebanyak 1 (satu) lembar.
308. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6559/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 November 2017 nilai Rp 5000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
309. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6621/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 November 2017 nilai Rp 31101158 sebanyak 1 (satu) lembar.
310. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6806/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 04 Desember 2017 nilai Rp 130974858 sebanyak 1 (satu) lembar.
311. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6821/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 04 Desember 2017 nilai Rp 3681431 sebanyak 1 (satu) lembar.
312. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7604/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 nilai Rp 32414847 sebanyak 1 (satu) lembar.
313. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7605/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 nilai Rp 11695823 sebanyak 1 (satu) lembar.
314. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor

Halaman 35 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7606/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 nilai Rp 12223201 sebanyak 1 (satu) lembar.
315. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7607/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
316. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7608/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 nilai Rp 23419024 sebanyak 1 (satu) lembar.
317. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7609/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 nilai Rp 28673780 sebanyak 1 (satu) lembar.
318. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7629/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 13 Desember 2017 nilai Rp 700000 sebanyak 1 (satu) lembar.
319. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7866/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Rp 12700000 sebanyak 1 (satu) lembar.
320. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8028/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Rp 120000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
321. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8029/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Rp 1313689 sebanyak 1 (satu) lembar.
322. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8030/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Rp 67500000 sebanyak 1 (satu) lembar.
323. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8031/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Rp 67500000 sebanyak 1 (satu) lembar.
324. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8501/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 nilai Rp 2220000 sebanyak 1 (satu) lembar.
325. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8502/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 nilai Rp 1350000 sebanyak 1 (satu) lembar.
326. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8503/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 nilai Rp 1510000 sebanyak 1 (satu) lembar.
327. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8504/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 nilai Rp

Halaman 36 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1170000 sebanyak 1 (satu) lembar.
328. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8505/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 nilai Rp 1440000 sebanyak 1 (satu) lembar.
329. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8585/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 nilai Rp 1390000 sebanyak 1 (satu) lembar.
330. Fotokopi Surat Keterangan nomor 900/016/BAKEUDA/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 dari Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang, Rekening Koran Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443000001 periode 05 Januari 2018, beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 1 (satu) set.
331. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 01/LS-BTL/1.20.01.01/2017 tanggal 16 Januari 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 1 (satu) lembar.
332. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 02/LS-BTL/04.01.01.01/2017 tanggal 01 Februari 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 2 (dua) lembar.
333. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 03/LS-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 28 Februari 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 2 (dua) lembar.
334. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 04/LS-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 03 April 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 2 (dua) lembar.
335. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 05/LS-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 02 Mei 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 2 (dua) lembar.
336. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 06/SPM-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 29 Mei 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 2 (dua) lembar.
337. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 07/LS-BTL/04.01.01.01/2017 tanggal 14 Juni 2017 nilai Rp 48004520 sebanyak 1 (satu) lembar.
338. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 08/LS-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 22 Juni 2017 nilai Rp 596340665 sebanyak 2 (dua) lembar.
339. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 09/LS-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 22 Juni 2017 nilai Rp 118878470 sebanyak 1 (satu) lembar.
340. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor



- 10/LS-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 04 Agustus 2017 nilai Rp 593952145 sebanyak 2 (dua) lembar.
341. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 11/LS-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 06 September 2017 sebanyak 2 (dua) lembar.
342. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 12/LS-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 20 September 2017 nilai Rp 983100000 sebanyak 1 (satu) lembar.
343. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 13/LS-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 37355150 sebanyak 2 (dua) lembar.
344. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 14/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Oktober 2017 nilai Rp 1124490540 sebanyak 2 (dua) lembar.
345. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 15/LS-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 01 November 2017 nilai Rp 1113400065 sebanyak 2 (dua) lembar.
346. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 16/LS-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 30 November 2017 nilai Rp 1113400065 sebanyak 2 (dua) lembar.
347. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 17/LS-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Rp 315000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
348. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 04/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 26 Januari 2017 nilai Rp 131389600 sebanyak 1 (satu) lembar.
349. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 05/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 30 Januari 2017 nilai Rp 7295389 sebanyak 1 (satu) lembar.
350. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 10/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp 31364268 sebanyak 1 (satu) lembar.
351. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 11/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp 24895823 sebanyak 1 (satu) lembar.
352. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 07/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp 26936890 sebanyak 1 (satu) lembar.
353. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 09/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp 37791646



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 1 (satu) lembar.
354. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
08/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp 59687469
- sebanyak 1 (satu) lembar.
355. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
12/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp 49232713
- sebanyak 1 (satu) lembar.
356. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
13/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 08 Februari 2017 nilai Rp 67400000
- sebanyak 1 (satu) lembar.
357. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
16/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 Februari 2017 nilai Rp
131389600
- sebanyak 1 (satu) lembar.
358. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
17/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Maret 2017 nilai Rp 67400000
- sebanyak 1 (satu) lembar.
359. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
19/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Maret 2017 nilai Rp 13536890
- sebanyak 1 (satu) lembar.
360. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
20/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Maret 2017 nilai Rp 29987469
- sebanyak 1 (satu) lembar.
361. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
23/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Maret 2017 nilai Rp 15764268
- sebanyak 1 (satu) lembar.
362. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
24/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Maret 2017 nilai Rp 24719024
- sebanyak 1 (satu) lembar.
363. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
22/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Maret 2017 nilai Rp 12495823
- sebanyak 1 (satu) lembar.
364. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
21/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Maret 2017 nilai Rp 18991646
- sebanyak 1 (satu) lembar.
365. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
25/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 Maret 2017 nilai Rp 131389600
- sebanyak 1 (satu) lembar.
366. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
29/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 05 April 2017 nilai Rp 67400000
- sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 39 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 28/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 05 April 2017 nilai Rp 6600000 sebanyak 1 (satu) lembar.
368. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 27/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 05 April 2017 nilai Rp 90000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
369. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 32/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 18 April 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
370. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 33/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 18 April 2017 nilai Rp 18991646 sebanyak 1 (satu) lembar.
371. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 36/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 18 April 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
372. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 35/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 18 April 2017 nilai Rp 12495823 sebanyak 1 (satu) lembar.
373. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 31/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 18 April 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
374. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 34/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 18 April 2017 nilai Rp 24719024 sebanyak 1 (satu) lembar.
375. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 38/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 April 2017 nilai Rp 131389600 sebanyak 1 (satu) lembar.
376. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 39/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 03 Mei 2017 nilai Rp 67400000 sebanyak 1 (satu) lembar.
377. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 43/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 18 Mei 2017 nilai Rp 18991646 sebanyak 1 (satu) lembar.
378. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 46/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 18 Mei 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
379. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 41/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 18 Mei 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
380. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor

Halaman 40 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 18 Mei 2017 nilai Rp 23019024
sebanyak 1 (satu) lembar.
381. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
42/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 18 Mei 2017 nilai Rp 29987469
sebanyak 1 (satu) lembar.
382. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
44/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 18 Mei 2017 nilai Rp 12495823
sebanyak 1 (satu) lembar.
383. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
48/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Mei 2017 nilai Rp 132308930
sebanyak 1 (satu) lembar.
384. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
49/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 06 Juni 2017 nilai Rp 67400000
sebanyak 1 (satu) lembar.
385. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
58/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Juni 2017 nilai Rp 100434800
sebanyak 1 (satu) lembar.
386. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
51/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 14 Juni 2017 nilai Rp 26036890
sebanyak 1 (satu) lembar.
387. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
54/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Juni 2017 nilai Rp 33927957
sebanyak 1 (satu) lembar.
388. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
52/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 14 Juni 2017 nilai Rp 30764268
sebanyak 1 (satu) lembar.
389. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
56/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 14 Juni 2017 nilai Rp 45982713
sebanyak 1 (satu) lembar.
390. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
55/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Juni 2017 nilai Rp 56237469
sebanyak 1 (satu) lembar.
391. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
53/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 14 Juni 2017 nilai Rp 21245823
sebanyak 1 (satu) lembar.
392. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
59/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Juni 2017 nilai Rp 132482482
sebanyak 1 (satu) lembar.
393. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
62/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Juni 2017 nilai Rp 124897834

Halaman 41 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 1 (satu) lembar.
394. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
65/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 12 Juli 2017 nilai Rp 67400000
- sebanyak 1 (satu) lembar.
395. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
66/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 19 Juli 2017 nilai Rp 90000000
- sebanyak 1 (satu) lembar.
396. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
70/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 24732713
- sebanyak 1 (satu) lembar.
397. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
71/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 15764268
- sebanyak 1 (satu) lembar.
398. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
72/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 12495823
- sebanyak 1 (satu) lembar.
399. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
73/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 17677957
- sebanyak 1 (satu) lembar.
400. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
69/LS-BL/4.0104.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 29987469
- sebanyak 1 (satu) lembar.
401. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
68/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 13536890
- sebanyak 1 (satu) lembar.
402. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
76/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 26 Juli 2017 nilai Rp 136780611
- sebanyak 1 (satu) lembar.
403. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
82/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 28 Juli 2017 nilai Rp 6600000
- sebanyak 1 (satu) lembar.
404. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
83/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 04 Agustus 2017 nilai Rp 69250000
- sebanyak 1 (satu) lembar.
405. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
90/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Agustus 2017 nilai Rp 29987469
- sebanyak 1 (satu) lembar.
406. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
89/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Agustus 2017 nilai Rp 13536890
- sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 42 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 91/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Agustus 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
408. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 92/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Agustus 2017 nilai Rp 17677957 sebanyak 1 (satu) lembar.
409. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 93/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Agustus 2017 nilai Rp 24732713 sebanyak 1 (satu) lembar.
410. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 98/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Agustus 2017 nilai Rp 60000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
411. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 97/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 23 Agustus 2017 nilai Rp 11095823 sebanyak 1 (satu) lembar.
412. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 106/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 23 Agustus 2017 nilai Rp 137090431 sebanyak 1 (satu) lembar.
413. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 110/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 08 September 2017 nilai Rp 69250000 sebanyak 1 (satu) lembar.
414. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 115/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 25 September 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
415. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 118/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 26 September 2017 nilai Rp 18991646 sebanyak 1 (satu) lembar.
416. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 116/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 25 September 2017 nilai Rp 11395823 sebanyak 1 (satu) lembar.
417. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 113/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 25 September 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
418. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 114/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 25 September 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
419. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 119/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 26 September 2017 nilai Rp 24732713 sebanyak 1 (satu) lembar.
420. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor

Halaman 43 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 137671983 sebanyak 1 (satu) lembar.
421. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 126/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 06 Oktober 2017 nilai Rp 69250000 sebanyak 1 (satu) lembar.
422. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 132/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
423. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 136/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017 nilai Rp 11695823 sebanyak 1 (satu) lembar.
424. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 133/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
425. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 137/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017 nilai Rp 20305335 sebanyak 1 (satu) lembar.
426. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 135/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017 nilai Rp 24732713 sebanyak 1 (satu) lembar.
427. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 134/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
428. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 145/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 26 Oktober 2017 nilai Rp 137906061 sebanyak 1 (satu) lembar.
429. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 162/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 09 November 2017 nilai Rp 67500000 sebanyak 1 (satu) lembar.
430. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 167/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 17 November 2017 nilai Rp 28673780 sebanyak 1 (satu) lembar.
431. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 169/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 17 November 2017 nilai Rp 23419024 sebanyak 1 (satu) lembar.
432. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 166/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 17 November 2017 nilai Rp 12223201 sebanyak 1 (satu) lembar.
433. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 168/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 17 November 2017 nilai Rp

Halaman 44 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
434. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
171/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 17 November 2017 nilai Rp
- 11695823 sebanyak 1 (satu) lembar.
435. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
139/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 09 November 2017 nilai Rp
- 5000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
436. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
170/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 17 November 2017 nilai Rp
- 31101158 sebanyak 1 (satu) lembar.
437. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
175/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 29 November 2017 nilai Rp
- 130974858 sebanyak 1 (satu) lembar.
438. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
176/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 29 November 2017 nilai Rp
- 3681431 sebanyak 1 (satu) lembar.
439. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
179/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 05 Desember 2017 nilai Rp
- 32414847 sebanyak 1 (satu) lembar.
440. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
183/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 05 Desember 2017 nilai Rp
- 11695823 sebanyak 1 (satu) lembar.
441. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
182/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 05 Desember 2017 nilai Rp
- 12223201 sebanyak 1 (satu) lembar.
442. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
184/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 05 Desember 2017 nilai Rp
- 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
443. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
180/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 05 Desember 2017 nilai Rp
- 23419024 sebanyak 1 (satu) lembar.
444. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
181/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 05 Desember 2017 nilai Rp
- 28673780 sebanyak 1 (satu) lembar.
445. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
173/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 23 November 2017 nilai Rp 700000
- sebanyak 1 (satu) lembar.
446. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor
186/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 nilai Rp
- 12700000 sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 45 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

447. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 192/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 13 Desember 2017 nilai Rp 120000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
448. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 177/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 19 Desember 2017 nilai Rp 1313689 sebanyak 1 (satu) lembar.
449. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 185/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 18 Desember 2017 nilai Rp 67500000 sebanyak 1 (satu) lembar.
450. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 199/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 19 Desember 2017 nilai Rp 67500000 sebanyak 1 (satu) lembar.
451. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 211/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Rp 2220000 sebanyak 1 (satu) lembar.
452. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 212/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Rp 1350000 sebanyak 1 (satu) lembar.
453. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 209/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 19 Desember 2017 nilai Rp 1510000 sebanyak 1 (satu) lembar.
454. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 208/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 19 Desember 2017 nilai Rp 1170000 sebanyak 1 (satu) lembar.
455. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 210/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 19 Desember 2017 nilai Rp 1440000 sebanyak 1 (satu) lembar.
456. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 214/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Rp 1390000 sebanyak 1 (satu) lembar.
457. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 01/SPP-LS/1.20.01.01/2017 tanggal 16 Januari 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 3 (tiga) lembar.
458. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 02/SPP-LS/04.01.01.01/2017 tanggal 01 Februari 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 2 (dua) lembar.
459. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 03/SPP-LS/4.01.01.01/2017 tanggal 28 Februari 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 2 (dua) lembar.
460. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor

Halaman 46 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL



- 04/SPP-LS/4.01.01.01/2017 tanggal 03 April 2017 nilai Rp 617690605
sebanyak 2 (dua) lembar.
461. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
05/SPP-LS/4.01.01.01/2017 tanggal 02 Mei 2017 nilai Rp 617690605
sebanyak 2 (dua) lembar.
462. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
06/SPP-LS/4.01.01.01/2017 tanggal 29 Mei 2017 nilai Rp 617690605
sebanyak 3 (tiga) lembar.
463. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
07/SPP-LS/4.01.01.01/2017 tanggal 14 Juni 2017 nilai Rp 48004520
sebanyak 3 (tiga) lembar.
464. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
08/SPP-LS/4.01.01.01/2017 tanggal 22 Juni 2017 nilai Rp 596340665
sebanyak 3 (tiga) lembar.
465. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
09/SPP-LS/4.01.01.01/2017 tanggal 22 Juni 2017 nilai Rp 118878470
sebanyak 3 (tiga) lembar.
466. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
10/SPP-LS/4.01.01.01/2017 tanggal 04 Agustus 2017 nilai Rp
593952145 sebanyak 3 (tiga) lembar.
467. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
11/SPP-LS/4.01.01.01/2017 tanggal 05 September 2017 sebanyak 3
(tiga) lembar.
468. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
12/SPP-LS/4.01.01.01/2017 tanggal 20 September 2017 nilai Rp
983100000 sebanyak 3 (tiga) lembar.
469. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
13/SPP-LS/4.01.01.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp
37355150 sebanyak 3 (tiga) lembar.
470. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
14/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Oktober 2017 nilai Rp
1124490540 sebanyak 3 (tiga) lembar.
471. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
15/SPP-LS/4.01.01.01/2017 tanggal 01 November 2017 nilai Rp
1113400065 sebanyak 3 (tiga) lembar.
472. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
16/SPP-LS/4.01.01.01/2017 tanggal 30 November 2017 nilai Rp
1113400065 sebanyak 3 (tiga) lembar.
473. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
17/SPP-LS/4.01.01.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Rp



- 315000000 sebanyak 3 (tiga) lembar.
474. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 04/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 26 Januari 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
475. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 05/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 27 Januari 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
476. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 10/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp 31364268 sebanyak 1 (satu) lembar.
477. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 11/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp 24895823 sebanyak 1 (satu) lembar.
478. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 07/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp 26936890 sebanyak 3 (tiga) lembar.
479. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 09/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp 37791646 sebanyak 1 (satu) lembar.
480. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 08/SPP-IS/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp 59687469 sebanyak 1 (satu) lembar.
481. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 12/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp 49232713 sebanyak 1 (satu) lembar.
482. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 13/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 08 Februari 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
483. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 16/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 27 Februari 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
484. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 17/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Maret 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
485. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 19/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Maret 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
486. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 20/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Maret 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

487. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 23/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Maret 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
488. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 24/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Maret 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
489. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 22/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Maret 2017 nilai Rp 12495823 sebanyak 1 (satu) lembar.
490. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 21/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Maret 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
491. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 25/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 27 Maret 2017 nilai Rp 131389600 sebanyak 3 (tiga) lembar.
492. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 29/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 05 April 2017 nilai Rp 67400000 sebanyak 1 (satu) lembar.
493. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 28/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 05 April 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
494. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 27/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 05 April 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
495. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 32/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 18 April 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
496. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 33/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 18 April 2017 nilai Rp 18991646 sebanyak 2 (dua) lembar.
497. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 36/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 18 April 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 2 (dua) lembar.
498. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 35/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 18 April 2017 nilai Rp 12495823 sebanyak 2 (dua) lembar.
499. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 31/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 18 April 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
500. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor

Halaman 49 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 18 April 2017 nilai Rp 24719024
sebanyak 2 (dua) lembar.
501. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
38/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 27 April 2017 nilai Rp 131389600
sebanyak 3 (tiga) lembar.
502. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
39/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 03 Mei 2017 nilai Rp 67400000
sebanyak 1 (satu) lembar.
503. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
43/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 18 Mei 2017 sebanyak 1 (satu)
lembar.
504. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
46/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 18 Mei 2017 sebanyak 1 (satu)
lembar.
505. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
41/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 18 Mei 2017 sebanyak 1 (satu)
lembar.
506. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
45/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 18 Mei 2017 sebanyak 1 (satu)
lembar.
507. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
42/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 18 Mei 2017 sebanyak 1 (satu)
lembar.
508. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
44/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 18 Mei 2017 sebanyak 1 (satu)
lembar.
509. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
48/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Mei 2017 nilai Rp 132308930
sebanyak 2 (dua) lembar.
510. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
49/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 06 Juni 2017 sebanyak 1 (satu)
lembar.
511. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
58/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Juni 2017 sebanyak 1 (satu)
lembar.
512. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
51/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 14 Juni 2017 sebanyak 1 (satu)
lembar.
513. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
54/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Juni 2017 sebanyak 1 (satu)



- lembar.
514. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
52/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 14 Juni 2017 sebanyak 1 (satu)
- lembar.
515. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
56/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 14 Juni 2017 sebanyak 1 (satu)
- lembar.
516. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
55/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Juni 2017 sebanyak 1 (satu)
- lembar.
517. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
53/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 14 Juni 2017 sebanyak 1 (satu)
- lembar.
518. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
59/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Juni 2017 sebanyak 1 (satu)
- lembar.
519. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
62/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Juni 2017 sebanyak 1 (satu)
- lembar.
520. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
65/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 12 Juli 2017 sebanyak 1 (satu)
- lembar.
521. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
66/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 19 Juli 2017 sebanyak 1 (satu)
- lembar.
522. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
70/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 sebanyak 1 (satu)
- lembar.
523. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
71/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 sebanyak 1 (satu)
- lembar.
524. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
72/SPP-IS/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 sebanyak 1 (satu)
- lembar.
525. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
73/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 sebanyak 1 (satu)
- lembar.
526. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor
69/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 sebanyak 1 (satu)
- lembar.



527. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 68/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
528. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 76/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 26 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
529. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 82/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 28 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
530. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 83/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 04 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
531. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 90/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
532. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 89/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
533. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 91/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
534. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 92/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
535. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 93/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
536. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 98/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
537. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 97/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 21 Agustus 2017 nilai Rp 11095823 sebanyak 1 (satu) lembar.
538. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 106/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 23 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
539. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 110/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 08 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
540. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 25 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
541. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 118/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 26 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
542. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 116/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 25 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
543. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 113/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 25 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
544. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 114/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 25 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
545. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 119/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 26 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
546. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 120/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 27 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
547. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 126/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 06 Oktober 2017 nilai Rp 69250000 sebanyak 1 (satu) lembar.
548. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 132/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
549. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 136/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
550. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 133/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
551. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 137/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
552. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 135/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
553. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 134/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017 sebanyak 1

Halaman 53 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) lembar.
554. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 145/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 26 Oktober 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
555. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 162/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 09 November 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
556. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 167/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 17 November 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
557. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 169/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 17 November 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
558. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 166/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 17 November 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
559. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 168/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 17 November 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
560. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 171/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 17 November 2017 nilai Rp 11695823 sebanyak 1 (satu) lembar.
561. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 139/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 19 Oktober 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
562. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 170/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 17 November 2017 nilai Rp 31101158 sebanyak 1 (satu) lembar.
563. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 175/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 29 November 2017 nilai Rp 130974858 sebanyak 1 (satu) lembar.
564. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 176/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 29 November 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
565. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 179/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 05 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
566. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 183/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 05 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

567. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 182/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 05 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
568. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 184/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 05 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
569. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 180/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 05 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
570. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 181/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 05 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
571. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 173/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 23 November 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
572. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 186/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
573. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 192/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 13 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
574. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 177/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 19 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
575. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 185/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
576. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 199/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 19 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
577. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 211/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
578. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 212/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
579. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 209/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 19 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
580. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor

Halaman 55 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



- 208/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 19 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
581. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 210/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 19 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
582. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 214/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
583. Fotokopi Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 80.A/S-HP/XVIII.PPG/06/2018 tanggal 28 Juni 2018 sebanyak 3 (tiga) lembar.
584. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 di Pangkalpinang oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 80.C/LHP/XVIII.PPG/06/2018 tanggal 28 Juni 2018 sebanyak 1 (satu) set.
585. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang nomor 18 tahun 2016 tanggal 29 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) set.
586. Fotokopi Surat Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang nomor 900/829/SETWAN/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 hal Tindak Lanjut hasil Temuan BPK RI sebanyak 5 (lima) lembar.
587. Fotokopi Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang nomor S-26129/WPJ.03/KP.06/2018 tanggal 14 Agustus 2018 hal Permintaan Keterangan Data Wajib Pajak sebanyak 4 (empat) lembar.
588. Fotokopi Surat Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang nomor 900/1038/SETWAN/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal PPh Pasal 21 yang harus disetor sebanyak 3 (tiga) lembar.
589. Fotokopi Surat Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang nomor 900/1074/SETWAN/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal Tanggapan atas Surat nomor: 900/1038/SETWAN/VIII/2018 sebanyak 1 (satu) lembar.
590. Fotokopi Surat Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang nomor 900/721/Setwan/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 perihal Penjelasan atas temuan BPK RI terhadap Bendahara Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang sebanyak 4 (empat) lembar.
591. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang nomor 22/KEP/BAKEUDA/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan



- Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 sebanyak 1 (satu) set.
592. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang nomor 257/KEP/BAKEUDA/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Walikota Pangkalpinang nomor 22/KEP/BAKEUDA/I/2017 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 sebanyak 1 (satu) set.
593. Fotokopi Surat Penunjukan Bendahara Pengeluaran Sementara nomor: 800/1192/SETWAN/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
594. Fotokopi Formulir Setoran Bank Sumsel Babel nomor F-003/ISO/BSB/1/2014 tanggal 05-01-2018, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Rekening Koran Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 periode Januari 2018 sebanyak 1 (satu) set.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah menjatuhkan Putusan Nomor 90 /Pid. B/2020/PN PGP tanggal 4 Juni 2020 dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUDIK WAHYOEDI bin HARSONO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan secara berlanjut"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar sebesar Rp355.496.640,- (tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) = sebesar Rp.710.993.280,00 (tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0007/SP2D-BTL/1.20.01.01/2017 tanggal 16 Januari 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 1 (satu) lembar.
 2. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0077/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 01 Februari 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 1 (satu) lembar.
 3. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0674/SP2D-BTL/ 4.01.01.01/2017 tanggal 01 Maret 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 1 (satu) lembar.
 4. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1146/SP2D-BTL/ 4.01.01.01/2017 tanggal 04 April 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 1 (satu) lembar.
 5. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1751/SP2D-BTL/ 4.01.01.01/2017 tanggal 02 Mei 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 1 (satu) lembar.
 6. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2333/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 02 Juni 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 1 (satu) lembar.
 7. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3027/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 48004520 sebanyak 1 (satu) lembar.
 8. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3226/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 03 Juli 2017 nilai Rp 596340665 sebanyak 1 (satu) lembar.



9. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3331/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 04 Juli 2017 nilai Rp 118878470 sebanyak 1 (satu) lembar.
10. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4021/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 04 Agustus 2017 nilai Rp 593952145 sebanyak 1 (satu) lembar.
11. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4749/SP2D-BTL/ 4.01.01.01/2017 tanggal 07 September 2017 nilai Rp 597153565 sebanyak 1 (satu) lembar.
12. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5010/SP2D-BTL/ 4.01.01.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 983100000 sebanyak 1 (satu) lembar.
13. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5077/SP2D-BTL/ 4.01.01.01/2017 tanggal 02 Oktober 2017 nilai Rp 37355150 sebanyak 1 (satu) lembar.
14. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5149/SP2D-BTL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 03 Oktober 2017 nilai Rp 1124490540 sebanyak 1 (satu) lembar.
15. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5892/SP2D-BTL/ 4.01.01.01/2017 tanggal 01 November 2017 nilai Rp 1113400065 sebanyak 1 (satu) lembar.
16. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7191/SP2D-BTL/ 4.01.01.01/2017 tanggal 07 Desember 2017 nilai Rp 1113400065 sebanyak 1 (satu) lembar.
17. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8268/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 22 Desember 2017 nilai Rp 315000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
18. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0055/SP2D-GJ/ 4.01.04.01/2017 tanggal 01 Februari 2017 nilai Rp 131389600 sebanyak 1 (satu) lembar.
19. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0102/SP2D-GJ/ 4.01.04.01/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp 7295389 sebanyak 1 (satu) lembar.
20. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0132/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 03 Februari 2017 nilai Rp 31364268 sebanyak 1 (satu) lembar.
21. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0133/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 03 Februari 2017 nilai Rp 24895823 sebanyak 1 (satu) lembar.
22. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0134/SP2D-BL/

Halaman 59 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL



- 4.01.04.01/2017 tanggal 03 Februari 2017 nilai Rp 26936890 sebanyak 1 (satu) lembar.
23. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0135/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 03 Februari 2017 nilai Rp 37791646 sebanyak 1 (satu) lembar.
24. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0136/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 03 Februari 2017 nilai Rp 59687469 sebanyak 1 (satu) lembar.
25. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0137/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 03 Februari 2017 nilai Rp 49232713 sebanyak 1 (satu) lembar.
26. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0362/ SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 09 Februari 2017 nilai Rp 67400000 sebanyak 1 (satu) lembar.
27. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0600/SP2D-GJ/ 4.01.04.01/2017 tanggal 01 Maret 2017 nilai Rp 131389600 sebanyak 1 (satu) lembar.
28. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0850/SP2D-BTL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 06 Maret 2017 nilai Rp 67400000 sebanyak 1 (satu) lembar.
29. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0988/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 20 Maret 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
30. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0989/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 20 Maret 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
31. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0990/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 20 Maret 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
32. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0991/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 20 Maret 2017 nilai Rp 24719024 sebanyak 1 (satu) lembar.
33. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0992/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 20 Maret 2017 nilai Rp 12495823 sebanyak 1 (satu) lembar.
34. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0993/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 20 Maret 2017 nilai Rp 18991646 sebanyak 1 (satu) lembar.
35. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1091/SP2D-GJ/ 4.01.04.01/2017 tanggal 03 April 2017 nilai Rp 131389600 sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar
36. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1396/SP2D-BTL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 10 April 2017 nilai Rp 67400000 sebanyak 1 (satu) lembar
37. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1462/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 11 April 2017 nilai Rp 66000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
38. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1492/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 12 April 2017 nilai Rp 900000000 sebanyak 1 (satu) lembar
39. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1589/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 20 April 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
40. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1590/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 20 April 2017 nilai Rp 18991646 sebanyak 1 (satu) lembar.
41. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1591/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 20 April 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
42. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1592/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 20 April 2017 nilai Rp 12495823 sebanyak 1 (satu) lembar.
43. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1593/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 20 April 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
44. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1594/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 20 April 2017 nilai Rp 24719024 sebanyak 1 (satu) lembar.
45. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1728/SP2D-GJ/ 4.01.04.01/2017 tanggal 02 Mei 2017 nilai Rp 131389600 sebanyak 1 (satu) lembar.
46. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1879/SP2D-BTL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 08 Mei 2017 nilai Rp 67400000 sebanyak 1 (satu) lembar.
47. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2168/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 nilai Rp 18991646 sebanyak 1 (satu) lembar.
48. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2169/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 61 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2170/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
50. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2171/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 nilai Rp 23019024 sebanyak 1 (satu) lembar.
51. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2172/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
52. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2173/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 nilai Rp 12495823 sebanyak 1 (satu) lembar.
53. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2277/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Juni 2017 nilai Rp 132308930 sebanyak 1 (satu) lembar.
54. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2577/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 07 Juni 2017 nilai Rp 67400000 sebanyak 1 (satu) lembar.
55. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3012/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 100434800 sebanyak 1 (satu) lembar.
56. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3083/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 26036890 sebanyak 1 (satu) lembar.
57. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3084/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 33927957 sebanyak 1 (satu) lembar.
58. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3085/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 30764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
59. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3086/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 45982713 sebanyak 1 (satu) lembar.
60. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3087/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 56237469 sebanyak 1 (satu) lembar.
61. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3088/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 21245823 sebanyak 1 (satu) lembar.
62. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3262/SP2D-GJ/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.01.04.01/2017 tanggal 03 Juli 2017 nilai Rp 132482482 sebanyak 1 (satu) lembar.
63. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3308/SP2D-GJ/ 4.01.04.01/2017 tanggal 04 Juli 2017 nilai Rp 124897834 sebanyak 1 (satu) lembar.
64. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3620/SP2D-BTL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 17 Juli 2017 nilai Rp 674000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
65. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3724/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 21 Juli 2017 nilai Rp 900000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
66. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3746/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 24732713 sebanyak 1 (satu) lembar.
67. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3747/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
68. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3748/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 12495823 sebanyak 1 (satu) lembar.
69. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3749/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 17677957 sebanyak 1 (satu) lembar.
70. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3750/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
71. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3751/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
72. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3814/SP2D-GJ/ 4.01.04.01/2017 tanggal 01 Agustus 2017 nilai Rp 136780611 sebanyak 1 (satu) lembar.
73. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3901/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 02 Agustus 2017 nilai Rp 660000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
74. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4020/SP2D-BTL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 04 Agustus 2017 nilai Rp 692500000 sebanyak 1 (satu) lembar.
75. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4313/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 22 Agustus 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 63 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar.
76. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4314/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Agustus 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
77. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4315/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Agustus 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
78. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4316/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Agustus 2017 nilai Rp 17677957 sebanyak 1 (satu) lembar.
79. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4334/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Agustus 2017 nilai Rp 24732713 sebanyak 1 (satu) lembar.
80. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4348/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 28 Agustus 2017 nilai Rp 60000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
81. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4349/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 28 Agustus 2017 nilai Rp 11095823 sebanyak 1 (satu) lembar.
82. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4473/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 04 September 2017 nilai Rp 137090431 sebanyak 1 (satu) lembar.
83. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4812/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 12 September 2017 nilai Rp 69250000 sebanyak 1 (satu) lembar.
84. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5029/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
85. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5030/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 18991646 sebanyak 1 (satu) lembar.
86. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5031/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 11395823 sebanyak 1 (satu) lembar.
87. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5032/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
88. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5033/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5034/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 24732713 sebanyak 1 (satu) lembar.
90. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5095/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Oktober 2017 nilai Rp 137671983 sebanyak 1 (satu) lembar.
91. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5355/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 09 Oktober 2017 nilai Rp 69250000 sebanyak 1 (satu) lembar.
92. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5524/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Oktober 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
93. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5525/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Oktober 2017 nilai Rp 11695823 sebanyak 1 (satu) lembar.
94. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5526/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Oktober 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
95. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5527/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Oktober 2017 nilai Rp 20305335 sebanyak 1 (satu) lembar.
96. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5528/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Oktober 2017 nilai Rp 24732713 sebanyak 1 (satu) lembar.
97. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5529/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Oktober 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
98. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5796/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 01 November 2017 nilai Rp 137906061 sebanyak 1 (satu) lembar.
99. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6337/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 13 November 2017 nilai Rp 67500000 sebanyak 1 (satu) lembar.
100. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6554/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 November 2017 nilai Rp 28673780 sebanyak 1 (satu) lembar.
101. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6555/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 November 2017 nilai Rp 23419024 sebanyak 1 (satu) lembar.
102. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6556/SP2D-BL/

Halaman 65 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.01.04.01/2017 tanggal 24 November 2017 nilai Rp 12223201
sebanyak 1 (satu) lembar.
103. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6557/SP2D-BL/
4.01.04.01/2017 tanggal 24 November 2017 nilai Rp 15764268
sebanyak 1 (satu) lembar.
104. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6558/SP2D-BL/
4.01.04.01/2017 tanggal 24 November 2017 nilai Rp 11695823
sebanyak 1 (satu) lembar.
105. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6559/SP2D-BL/
4.01.04.01/2017 tanggal 24 November 2017 nilai Rp 5000000
sebanyak 1 (satu) lembar.
106. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6621/SP2D-BL/
4.01.04.01/2017 tanggal 24 November 2017 nilai Rp 31101158
sebanyak 1 (satu) lembar.
107. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6806/SP2D-GJ/
4.01.04.01/2017 tanggal 04 Desember 2017 nilai Rp 130974858
sebanyak 1 (satu) lembar.
108. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6821/SP2D-GJ/
4.01.04.01/2017 tanggal 04 Desember 2017 nilai Rp 3681431
sebanyak 1 (satu) lembar.
109. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7604/SP2D-BL/
4.01.04.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 nilai Rp 32414847
sebanyak 1 (satu) lembar.
110. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7605/SP2D-BL/
4.01.04.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 nilai Rp 11695823
sebanyak 1 (satu) lembar.
111. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7606/SP2D-BL/
4.01.04.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 nilai Rp 12223201
sebanyak 1 (satu) lembar.
112. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7607/SP2D-BL/
4.01.04.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 nilai Rp 15764268
sebanyak 1 (satu) lembar.
113. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7608/SP2D-BL/
4.01.04.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 nilai Rp 23419024
sebanyak 1 (satu) lembar.
114. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7609/SP2D-BL/
4.01.04.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 nilai Rp 28673780
sebanyak 1 (satu) lembar.
115. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7629/SP2D-BL/
4.01.04.01/2017 tanggal 13 Desember 2017 nilai Rp 700000 sebanyak

Halaman 66 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar.
116. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7866/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Rp 12700000 sebanyak 1 (satu) lembar.
117. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8028/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Rp 120000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
118. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 80.29/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Rp 1313689 seb.anyak 1 (satu) lembar.
119. Foto.kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8030/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Rp 67500000 seban.yak 1 (satu) lembar.
120. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8031/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Rp 67500000 sebanyak 1 (satu) lembar.
121. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8501/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 nilai Rp 2220000 sebanyak 1 (satu) lembar.
122. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8502/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 nilai Rp 1350000 sebanyak 1 (satu) lembar.
123. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8503/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 nilai Rp 1510000 sebanyak 1 (satu) lembar.
124. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8504/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 nilai Rp 1170000 sebanyak 1 (satu) lembar.
125. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8505/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 nilai Rp 1440000 sebanyak 1 (satu) lembar.
126. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8585/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 nilai Rp 1390000 sebanyak 1 (satu) lembar.
127. Print-Out Rekening Rekening Giro Dinas Pemda (Bank Sumsel Babel) atas nama DPRD Kota PKP nomor rekening 1443010029 (IDR) periode 01 Jan 2017 s/d 31 Des 2017 sebanyak 8 (delapan) lembar.
128. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 345008 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 67 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 345009 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
130. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. 345010, no. CD 405212, dan no. CD 527217 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
131. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405211 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
132. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405213, no. CD 527221, dan no. CD 610432 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
133. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405216 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
134. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405219 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
135. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405220, no. CD 527223, dan no. CD 527225 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
136. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405711, no. CD 405718, dan no. CD 527228 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
137. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405712, no. CD 405725, dan no. CD 611157 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
138. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405713 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
139. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405715 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
140. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor

Halaman 68 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405716, no. CD 405727, dan no. CD 527216 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
141. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405717, no. CD 527211, dan no. CD 527212 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
142. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405719 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
143. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405720 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
144. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405721 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
145. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405722, no. CD 405723, dan no. CD 405724 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
146. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405726 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
147. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405728, no. CD 610440, dan no. CD 611151 beserta halaman validasi Bank sebanyak 2 (dua) lembar.
148. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 405729, no. CD 610438, dan no. CD 611156 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
149. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 527213 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
150. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 527214 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
151. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no.

Halaman 69 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CD 527215 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
152. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no.
- CD 527218 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
153. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no.
- CD 527219 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
154. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no.
- CD 527220 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
155. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no.
- CD 527222, no. CD 527224, dan no. CD 527229 beserta halaman validasi Bank sebanyak 2 (dua) lembar.
156. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no.
- CD 527226 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
157. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no.
- CD 527230 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
158. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no.
- CD 610433 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
159. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 14.43010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 610434 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
160. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no.
- CD 610435 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
161. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no.
- CD 610436 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
162. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no.
- CD 611152 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
163. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no.
- CD 611153 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
164. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor

Halaman 70 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 611154 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
165. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 611159 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
166. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 611160 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
167. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 645161 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
168. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 645163 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
169. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 645164 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
170. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 645165 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
171. Fotokopi Cek Penarikan Tunai atas rekening Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 yang telah dicairkan pada tahun 2017 dengan no. CD 645167 beserta halaman validasi Bank sebanyak 1 (satu) lembar.
172. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 09 Maret 2017 Jumlah Setor Rp 1528506 nomor NTPN 408C02RJ7UBLGFR8 sebanyak 1 (satu) lembar.
173. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 06 Juli 2017 Jumlah Setor Rp 71344520 nomor NTPN AA1E911EASHV7RPO sebanyak 1 (satu) lembar.
174. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 09 Maret 2017 Jumlah Setor

Halaman 71 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp 1528506 nomor NTPN 333AB2RJ9CTP7CR8 sebanyak 1 (satu) lembar.
175. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 17 April 2017 Jumlah Setor Rp 1528506 nomor NTPN A782758SOF3PSSH8 sebanyak 1 (satu) lembar.
176. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 07 April 2017 Jumlah Setor Rp 71344520 nomor NTPN 319DB21T1G46TMRO sebanyak 1 (satu) lembar.
177. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 10 Mei 2017 Jumlah Setor Rp 1528506 nomor NTPN E3C8D6NL7JV28BNO sebanyak 1 (satu) lembar.
178. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 06 Juli 2017 Jumlah Setor Rp 4500000 nomor NTPN 7538811CJJ1I1DPO sebanyak 1 (satu) lembar.
179. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 06 Juli 2017 Jumlah Setor Rp 1569991 nomor NTPN F901A11D5KF03RPO sebanyak 1 (satu) lembar.
180. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 20 Juli 2017 Jumlah Setor Rp 1569991 nomor NTPN 2CF2D25FH30KRNGO sebanyak 1 (satu) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar.
181. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 07 Agustus 2017 Jumlah Setor Rp 68805000 nomor NTPN 2D3ED3VNEFG5NL48 sebanyak 1 (satu) lembar.
182. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 29 Agustus 2017 Jumlah Setor Rp 3000000 nomor NTPN 697DF6FB0KHC4NV8 sebanyak 1 (satu) lembar.
183. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 19 September 2017 Jumlah Setor Rp 1509962 nomor NTPN 2296104V5PLCRSS8 sebanyak 1 (satu) lembar.
184. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 11 September 2017 Jumlah Setor Rp 68974520 nomor NTPN 3CD2D7PLKOE0FO8 sebanyak 1 (satu) lembar.
185. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 19 September 2017 Jumlah Setor Rp 1509962 nomor NTPN E2EFD04UTKSQ20S8 sebanyak 1 (satu) lembar.
186. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 19 September 2017 Jumlah Setor Rp 4500000 nomor NTPN 5F97B04UN807MQS8 sebanyak 1 (satu) lembar.
187. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN

Halaman 73 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 28 September 2017 Jumlah Setor Rp 147465000 nomor NTPN 08BA31PU8U1QCEOO sebanyak 1 (satu) lembar.
188. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 03 Oktober 2017 Jumlah Setor Rp 146359520 nomor NTPN 6A1E62DMC37T0768 sebanyak 1 (satu) lembar.
189. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 03 Oktober 2017 Jumlah Setor Rp 4912500 nomor NTPN 58AF42DM963LID68 sebanyak 1 (satu) lembar.
190. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 02 November 2017 Jumlah Setor Rp 145707020 nomor NTPN 523875C1UI2CS3VO sebanyak 1 (satu) lembar.
191. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 11 Desember 2017 Jumlah Setor Rp 145707020 nomor NTPN B914509I3Q4M6SE8 sebanyak 1 (satu) lembar.
192. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 29 Desember 2017 Jumlah Setor Rp 3024162 nomor NTPN 2A40237M509T7D78 sebanyak 1 (satu) lembar.
193. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara

Halaman 74 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang
NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 29 Desember 2017 Jumlah
Setor Rp 3014450 nomor NTPN 4BFE837M177JI878 sebanyak 1 (satu)
lembar.
194. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN
NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang
NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 29 Desember 2017 Jumlah
Setor Rp 6000000 nomor NTPN 8FE2137M86O5D078 sebanyak 1
(satu) lembar.
195. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN
NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang
NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 29 Desember 2017 Jumlah
Setor Rp 900000 nomor NTPN B4AB637MBD6DIJ78 sebanyak 1 (satu)
lembar.
196. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN
NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Masa/Angsuran Bendahara
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II Pangkalpinang
NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 29 Desember 2017 Jumlah
Setor Rp 47250000 nomor NTPN D376037UBGQRI378 sebanyak 1
(satu) lembar.
197. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN
NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Pengukapan Ketidakbenaran
Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II
Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 09 Agustus
2019 Jumlah Setor Rp 42000 nomor NTPN 4987F3O0SI42D26H
sebanyak 1 (satu) lembar.
198. Print-Out Data Konfirmasi MPN/NTPN Data MPN (Konfirmasi MPN
NTPN) atas Setoran PPh Pasal 21-Sanksi Administrasi pengungkap
Bendahara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kodya Dati II
Pangkalpinang NPWP 00.002.381.2-304.000 tanggal Setor 09 Agustus
2019 Jumlah Setor Rp 63000 nomor NTPN B18FA12OD2CT6C0P
sebanyak 1 (satu) lembar.
199. Fotokopi Surat Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang nomor
900/829/SETWAN/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 hal Tindak Lanjut hasil
Temuan BPK RI sebanyak 5 (lima) lembar.
200. Fotokopi Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang nomor

Halaman 75 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2DK-7171/WPJ.03/KP.06/2018 tanggal 12 Juli 2018 hal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan sebanyak 2 (dua) lembar.
201. Fotokopi Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang nomor S-26129/WPJ.03/KP.06/2018 tanggal 14 Agustus 2018 hal Permintaan Keterangan Data Wajib Pajak sebanyak 4 (empat) lembar.
202. Fotokopi Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang nomor SP2DK-3038/WPJ.03/KP.06/2019 tanggal 23 Mei 2019 hal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kedua atas temuan BPK RI Tahun Anggaran 2017 sebanyak 2 (dua) lembar.
203. Fotokopi Surat Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang nomor 900/721/Setwan/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 perihal Penjelasan atas temuan BPK RI terhadap Bendahara Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang sebanyak 4 (empat) lembar.
204. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0007/SP2D-BTL/1.20.01.01/2017 tanggal 16 Januari 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 1 (satu) lembar.
205. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0077/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 01 Februari 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 1 (satu) lembar.
206. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0674/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 01 Maret 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 1 (satu) lembar.
207. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1146/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 04 April 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 1 (satu) lembar.
208. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1751/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 02 Mei 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 1 (satu) lembar.
209. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2333/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 02 Juni 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 1 (satu) lembar.
210. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3027/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 48004520 sebanyak 1 (satu) lembar.
211. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3226/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 03 Juli 2017 nilai Rp 596340665 sebanyak 1 (satu) lembar.
212. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3331/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 04 Juli 2017 nilai Rp 118878470

Halaman 76 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 1 (satu) lembar.
213. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4021/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 04 Agustus 2017 nilai Rp 593952145 sebanyak 1 (satu) lembar.
214. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4749/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 07 September 2017 nilai Rp 597153565 sebanyak 1 (satu) lembar.
215. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5010/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 983100000 sebanyak 1 (satu) lembar.
216. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5077/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 02 Oktober 2017 nilai Rp 37355150 sebanyak 1 (satu) lembar.
217. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5149/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 03 Oktober 2017 nilai Rp 1124490540 sebanyak 1 (satu) lembar.
218. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5892/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 01 November 2017 nilai Rp 1113400065 sebanyak 1 (satu) lembar.
219. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7191/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 07 Desember 2017 nilai Rp 1113400065 sebanyak 1 (satu) lembar.
220. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8268/SP2D-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 22 Desember 2017 nilai Rp 315000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
221. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0055/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 01 Februari 2017 nilai Rp 131389600 sebanyak 1 (satu) lembar.
222. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0102/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp 7295389 sebanyak 1 (satu) lembar.
223. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0132/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 03 Februari 2017 nilai Rp 31364268 sebanyak 1 (satu) lembar.
224. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0133/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 03 Februari 2017 nilai Rp 24895823 sebanyak 1 (satu) lembar.
225. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0134/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 03 Februari 2017 nilai Rp 26936890 sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 77 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0135/ SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 03 Februari 2017 nilai Rp 37791646 sebanyak 1 (satu) lembar.
227. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0136/ SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 03 Februari 2017 nilai Rp 59687469 sebanyak 1 (satu) lembar.
228. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0137/ SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 03 Februari 2017 nilai Rp 49232713 sebanyak 1 (satu) lembar.
229. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0362/ SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 09 Februari 2017 nilai Rp 67400000 sebanyak 1 (satu) lembar.
230. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0600/ SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 01 Maret 2017 nilai Rp 131389600 sebanyak 1 (satu) lembar.
231. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0850/ SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 06 Maret 2017 nilai Rp 67400000 sebanyak 1 (satu) lembar.
232. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0988/ SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Maret 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
233. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0989/ SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Maret 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
234. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0990/ SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 20 Maret 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
235. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0991/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 20 Maret 2017 nilai Rp 24719024 sebanyak 1 (satu) lembar.
236. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0992/SP2D-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 20 Maret 2017 nilai Rp 12495823 sebanyak 1 (satu) lembar.
237. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0993/ SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Maret 2017 nilai Rp 18991646 sebanyak 1 (satu) lembar.
238. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1091/SP2D-GJ/ 4.01.04.01/2017 tanggal 03 April 2017 nilai Rp 131389600 sebanyak 1 (satu) lembar.
239. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1396/

Halaman 78 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 10 April 2017 nilai Rp 67400000
sebanyak 1 (satu) lembar.
240. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1462/SP2D-BL/
4.01.04.01/2017 tanggal 11 April 2017 nilai Rp 6600000 sebanyak 1
(satu) lembar.
241. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1492/SP2D-BL/
4.01.04.01/2017 tanggal 12 April 2017 nilai Rp 90000000 sebanyak 1
(satu) lembar.
242. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1589/SP2D-BL/
4.01.04.01/2017 tanggal 20 April 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1
(satu) lembar.
243. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1590/SP2D-BL/
4.01.04.01/2017 tanggal 20 April 2017 nilai Rp 18991646 sebanyak 1
(satu) lembar.
244. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1591/SP2D-BL/
4.01.04.01/2017 tanggal 20 April 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1
(satu) lembar.
245. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1592/SP2D-BL/
4.01.04.01/2017 tanggal 20 April 2017 nilai Rp 12495823 sebanyak 1
(satu) lembar.
246. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1593/SP2D-BL/
4.01.04.01/2017 tanggal 20 April 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1
(satu) lembar.
247. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1594/SP2D-BL/
4.01.04.01/2017 tanggal 20 April 2017 nilai Rp 24719024 sebanyak 1
(satu) lembar.
248. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1728/SP2D-GJ/
4.01.04.01/2017 tanggal 02 Mei 2017 nilai Rp 131389600 sebanyak 1
(satu) lembar.
249. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1879/
SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 08 Mei 2017 nilai Rp 67400000
sebanyak 1 (satu) lembar.
250. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2168/SP2D-BL/
4.01.04.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 nilai Rp 18991646 sebanyak 1
(satu) lembar.
251. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2169/SP2D-BL/
4.01.04.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1
(satu) lembar.
252. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2170/SP2D-BL/
4.01.04.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar.
253. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2171/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 nilai Rp 23019024 sebanyak 1 (satu) lembar.
254. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2172/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
255. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2173/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Mei 2017 nilai Rp 12495823 sebanyak 1 (satu) lembar.
256. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2277/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Juni 2017 nilai Rp 132308930 sebanyak 1 (satu) lembar.
257. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2577/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 07 Juni 2017 nilai Rp 67400000 sebanyak 1 (satu) lembar.
258. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3012/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 100434800 sebanyak 1 (satu) lembar.
259. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3083/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 26036890 sebanyak 1 (satu) lembar.
260. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3084/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 33927957 sebanyak 1 (satu) lembar.
261. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3085/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 30764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
262. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3086/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 45982713 sebanyak 1 (satu) lembar.
263. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3087/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 56237469 sebanyak 1 (satu) lembar.
264. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3088/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Juni 2017 nilai Rp 21245823 sebanyak 1 (satu) lembar.
265. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3262/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 03 Juli 2017 nilai Rp 132482482 sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 80 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3308/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 04 Juli 2017 nilai Rp 124897834 sebanyak 1 (satu) lembar.
267. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3620/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 17 Juli 2017 nilai Rp 67400000 sebanyak 1 (satu) lembar.
268. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3724/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 21 Juli 2017 nilai Rp 90000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
269. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3746/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 24732713 sebanyak 1 (satu) lembar.
270. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3747/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
271. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3748/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 12495823 sebanyak 1 (satu) lembar.
272. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3749/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 17677957 sebanyak 1 (satu) lembar.
273. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3750/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
274. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3751/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
275. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3814/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 01 Agustus 2017 nilai Rp 136780611 sebanyak 1 (satu) lembar.
276. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3901/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Agustus 2017 nilai Rp 66000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
277. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4020/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 04 Agustus 2017 nilai Rp 69250000 sebanyak 1 (satu) lembar.
278. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4313/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Agustus 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
279. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4314/SP2D-BL/

Halaman 81 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.01.04.01/2017 tanggal 22 Agustus 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
280. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4315/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Agustus 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
281. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4316/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Agustus 2017 nilai Rp 17677957 sebanyak 1 (satu) lembar.
282. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4334/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Agustus 2017 nilai Rp 24732713 sebanyak 1 (satu) lembar.
283. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4348/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 28 Agustus 2017 nilai Rp 60000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
284. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4349/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 28 Agustus 2017 nilai Rp 11095823 sebanyak 1 (satu) lembar.
285. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4473/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 04 September 2017 nilai Rp 137090431 sebanyak 1 (satu) lembar.
286. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4812/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 12 September 2017 nilai Rp 69250000 sebanyak 1 (satu) lembar.
287. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5029/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
288. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5030/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 18991646 sebanyak 1 (satu) lembar.
289. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5031/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 11395823 sebanyak 1 (satu) lembar.
290. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5032/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
291. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5033/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
292. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5034/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 24732713

Halaman 82 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 1 (satu) lembar.
293. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5095/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Oktober 2017 nilai Rp 137671983 sebanyak 1 (satu) lembar.
294. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5355/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 09 Oktober 2017 nilai Rp 69250000 sebanyak 1 (satu) lembar.
295. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5524/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Oktober 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
296. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5525/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Oktober 2017 nilai Rp 11695823 sebanyak 1 (satu) lembar.
297. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5526/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Oktober 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
298. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5527/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Oktober 2017 nilai Rp 20305335 sebanyak 1 (satu) lembar.
299. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5528/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Oktober 2017 nilai Rp 24732713 sebanyak 1 (satu) lembar.
300. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5529/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 16 Oktober 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
301. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 5796/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 01 November 2017 nilai Rp 137906061 sebanyak 1 (satu) lembar.
302. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6337/SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 13 November 2017 nilai Rp 67500000 sebanyak 1 (satu) lembar.
303. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6554/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 November 2017 nilai Rp 28673780 sebanyak 1 (satu) lembar.
304. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6555/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 November 2017 nilai Rp 23419024 sebanyak 1 (satu) lembar.
305. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6556/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 November 2017 nilai Rp 12223201 sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 83 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6557/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 November 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
307. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6558/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 November 2017 nilai Rp 11695823 sebanyak 1 (satu) lembar.
308. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6559/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 November 2017 nilai Rp 5000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
309. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6621/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 24 November 2017 nilai Rp 31101158 sebanyak 1 (satu) lembar.
310. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6806/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 04 Desember 2017 nilai Rp 130974858 sebanyak 1 (satu) lembar.
311. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 6821/SP2D-GJ/4.01.04.01/2017 tanggal 04 Desember 2017 nilai Rp 3681431 sebanyak 1 (satu) lembar.
312. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7604/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 nilai Rp 32414847 sebanyak 1 (satu) lembar.
313. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7605/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 nilai Rp 11695823 sebanyak 1 (satu) lembar.
314. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7606/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 nilai Rp 12223201 sebanyak 1 (satu) lembar.
315. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7607/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
316. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7608/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 nilai Rp 23419024 sebanyak 1 (satu) lembar.
317. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7609/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 nilai Rp 28673780 sebanyak 1 (satu) lembar.
318. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7629/SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 13 Desember 2017 nilai Rp 700000 sebanyak 1 (satu) lembar.
319. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 7866/SP2D-BL/

Halaman 84 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Rp 12700000
sebanyak 1 (satu) lembar.
320. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8028/SP2D-BL/
4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Rp 120000000
sebanyak 1 (satu) lembar.
321. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8029/SP2D-BL/
4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Rp 1313689
sebanyak 1 (satu) lembar.
322. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8030/
SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Rp
67500000 sebanyak 1 (satu) lembar.
323. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8031/
SP2D-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Rp
67500000 sebanyak 1 (satu) lembar.
324. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8501/
SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 nilai Rp 2220000
sebanyak 1 (satu) lembar.
325. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8502/
SP2D-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 nilai Rp 1350000
sebanyak 1 (satu) lembar.
326. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8503/SP2D-BL/
4.01.04.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 nilai Rp 1510000
sebanyak 1 (satu) lembar.
327. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8504/SP2D-BL/
4.01.04.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 nilai Rp 1170000
sebanyak 1 (satu) lembar.
328. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8505/SP2D-BL/
4.01.04.01/2017 tanggal 27 Desember 2017 nilai Rp 1440000
sebanyak 1 (satu) lembar.
329. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 8585/SP2D-BL/
4.01.04.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 nilai Rp 1390000
sebanyak 1 (satu) lembar.
330. Fotokopi Surat Keterangan nomor 900/016/BAKEUDA/VIII/2019 tanggal
08 Agustus 2019 dari Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang,
Rekening Koran Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443000001
periode 05 Januari 2018, beserta Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) sebanyak 1 (satu) set.
331. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 01/LS-BTL/1.20.01.01/
2017 tanggal 16 Januari 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 1 (satu)

Halaman 85 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar.
332. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 02/LS-BTL/04.01.01.01/2017 tanggal 01 Februari 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 2 (dua) lembar.
333. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 03/LS-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 28 Februari 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 2 (dua) lembar.
334. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 04/LS-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 03 April 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 2 (dua) lembar.
335. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 05/LS-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 02 Mei 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 2 (dua) lembar.
336. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 06/SPM-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 29 Mei 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 2 (dua) lembar.
337. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 07/LS-BTL/04.01.01.01/2017 tanggal 14 Juni 2017 nilai Rp 48004520 sebanyak 1 (satu) lembar.
338. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 08/LS-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 22 Juni 2017 nilai Rp 596340665 sebanyak 2 (dua) lembar.
339. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 09/LS-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 22 Juni 2017 nilai Rp 118878470 sebanyak 1 (satu) lembar.
340. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 10/LS-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 04 Agustus 2017 nilai Rp 593952145 sebanyak 2 (dua) lembar.
341. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 11/LS-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 06 September 2017 sebanyak 2 (dua) lembar.
342. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 12/LS-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 20 September 2017 nilai Rp 983100000 sebanyak 1 (satu) lembar.
343. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 13/LS-BTL/4.01.01.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 37355150 sebanyak 2 (dua) lembar.
344. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 14/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Oktober 2017 nilai Rp 1124490540 sebanyak 2 (dua) lembar.
345. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 15/LS-BTL/4.01.01.01/

Halaman 86 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 tanggal 01 November 2017 nilai Rp 1113400065 sebanyak 2 (dua) lembar.
346. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 16/LS-BTL/4.01.01.01/ 2017 tanggal 30 November 2017 nilai Rp 1113400065 sebanyak 2 (dua) lembar.
347. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 17/LS-BTL/4.01.01.01/ 2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Rp 315000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
348. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 04/LS-BTL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 26 Januari 2017 nilai Rp 131389600 sebanyak 1 (satu) lembar.
349. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 05/LS-BTL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 30 Januari 2017 nilai Rp 7295389 sebanyak 1 (satu) lembar.
350. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 10/LS-BL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp 31364268 sebanyak 1 (satu) lembar.
351. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 11/LS-BL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp 24895823 sebanyak 1 (satu) lembar.
352. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 07/LS-BL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp 26936890 sebanyak 1 (satu) lembar.
353. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 09/LS-BL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp 37791646 sebanyak 1 (satu) lembar.
354. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 08/LS-BL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp 59687469 sebanyak 1 (satu) lembar.
355. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 12/LS-BL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp 49232713 sebanyak 1 (satu) lembar.
356. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 13/LS-BTL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 08 Februari 2017 nilai Rp 674000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
357. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 16/LS-BTL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 27 Februari 2017 nilai Rp 131389600 sebanyak 1 (satu) lembar.
358. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 17/LS-BTL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 02 Maret 2017 nilai Rp 674000000 sebanyak 1 (satu)

Halaman 87 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar.
359. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 19/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Maret 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
360. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 20/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Maret 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
361. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 23/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Maret 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
362. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 24/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Maret 2017 nilai Rp 24719024 sebanyak 1 (satu) lembar.
363. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 22/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Maret 2017 nilai Rp 12495823 sebanyak 1 (satu) lembar.
364. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 21/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Maret 2017 nilai Rp 18991646 sebanyak 1 (satu) lembar.
365. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 25/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 Maret 2017 nilai Rp 131389600 sebanyak 1 (satu) lembar.
366. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 29/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 05 April 2017 nilai Rp 67400000 sebanyak 1 (satu) lembar.
367. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 28/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 05 April 2017 nilai Rp 6600000 sebanyak 1 (satu) lembar.
368. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 27/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 05 April 2017 nilai Rp 90000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
369. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 32/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 18 April 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
370. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 33/LS-BL/ 4.01.04.01/2017 tanggal 18 April 2017 nilai Rp 18991646 sebanyak 1 (satu) lembar.
371. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 36/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 18 April 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
372. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 35/LS-BL/4.01.04.01/

Halaman 88 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 tanggal 18 April 2017 nilai Rp 12495823 sebanyak 1 (satu) lembar.
373. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 31/LS-BL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 18 April 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
374. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 34/LS-BL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 18 April 2017 nilai Rp 24719024 sebanyak 1 (satu) lembar.
375. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 38/LS-BTL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 27 April 2017 nilai Rp 131389600 sebanyak 1 (satu) lembar.
376. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 39/LS-BTL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 03 Mei 2017 nilai Rp 67400000 sebanyak 1 (satu) lembar.
377. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 43/LS-BL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 18 Mei 2017 nilai Rp 18991646 sebanyak 1 (satu) lembar.
378. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 46/LS-BL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 18 Mei 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
379. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 41/LS-BL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 18 Mei 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
380. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 45/LS-BL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 18 Mei 2017 nilai Rp 23019024 sebanyak 1 (satu) lembar.
381. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 42/LS-BL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 18 Mei 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
382. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 44/LS-BL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 18 Mei 2017 nilai Rp 12495823 sebanyak 1 (satu) lembar.
383. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 48/LS-BTL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 24 Mei 2017 nilai Rp 132308930 sebanyak 1 (satu) lembar.
384. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 49/LS-BTL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 06 Juni 2017 nilai Rp 67400000 sebanyak 1 (satu) lembar.
385. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 58/LS-BTL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 15 Juni 2017 nilai Rp 100434800 sebanyak 1 (satu) lembar.
386. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 51/LS-BL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 14 Juni 2017 nilai Rp 26036890 sebanyak 1 (satu) lembar.
387. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 54/LS-BL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 15 Juni 2017 nilai Rp 33927957 sebanyak 1 (satu) lembar.
388. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 52/LS-BL/4.01.04.01/

Halaman 89 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 tanggal 14 Juni 2017 nilai Rp 30764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
389. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 56/LS-BL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 14 Juni 2017 nilai Rp 45982713 sebanyak 1 (satu) lembar.
390. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 55/LS-BL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 15 Juni 2017 nilai Rp 56237469 sebanyak 1 (satu) lembar.
391. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 53/LS-BL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 14 Juni 2017 nilai Rp 21245823 sebanyak 1 (satu) lembar.
392. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 59/LS-BTL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 15 Juni 2017 nilai Rp 132482482 sebanyak 1 (satu) lembar.
393. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 62/LS-BTL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 22 Juni 2017 nilai Rp 124897834 sebanyak 1 (satu) lembar.
394. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 65/LS-BTL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 12 Juli 2017 nilai Rp 67400000 sebanyak 1 (satu) lembar.
395. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 66/LS-BL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 19 Juli 2017 nilai Rp 90000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
396. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 70/LS-BL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 24732713 sebanyak 1 (satu) lembar.
397. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 71/LS-BL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
398. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 72/LS-BL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 12495823 sebanyak 1 (satu) lembar.
399. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 73/LS-BL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 17677957 sebanyak 1 (satu) lembar.
400. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 69/LS-BL/4.0104.01/ 2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
401. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 68/LS-BL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 24 Juli 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
402. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 76/LS-BTL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 26 Juli 2017 nilai Rp 136780611 sebanyak 1 (satu) lembar.
403. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 82/LS-BL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 28 Juli 2017 nilai Rp 66000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
404. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 83/LS-BTL/4.01.04.01/ 2017 tanggal 04 Agustus 2017 nilai Rp 69250000 sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 90 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 90/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Agustus 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
406. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 89/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Agustus 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
407. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 91/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Agustus 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
408. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 92/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Agustus 2017 nilai Rp 17677957 sebanyak 1 (satu) lembar.
409. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 93/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Agustus 2017 nilai Rp 24732713 sebanyak 1 (satu) lembar.
410. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 98/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Agustus 2017 nilai Rp 60000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
411. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 97/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 23 Agustus 2017 nilai Rp 11095823 sebanyak 1 (satu) lembar.
412. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 106/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 23 Agustus 2017 nilai Rp 137090431 sebanyak 1 (satu) lembar.
413. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 110/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 08 September 2017 nilai Rp 69250000 sebanyak 1 (satu) lembar.
414. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 115/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 25 September 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
415. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 118/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 26 September 2017 nilai Rp 18991646 sebanyak 1 (satu) lembar.
416. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 116/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 25 September 2017 nilai Rp 11395823 sebanyak 1 (satu) lembar.
417. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 113/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 25 September 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
418. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 114/LS-BL/4.01.04.01/

Halaman 91 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2017 tanggal 25 September 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
419. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 119/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 26 September 2017 nilai Rp 24732713 sebanyak 1 (satu) lembar.
420. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 120/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 137671983 sebanyak 1 (satu) lembar.
421. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 126/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 06 Oktober 2017 nilai Rp 69250000 sebanyak 1 (satu) lembar.
422. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 132/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017 nilai Rp 13536890 sebanyak 1 (satu) lembar.
423. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 136/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017 nilai Rp 11695823 sebanyak 1 (satu) lembar.
424. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 133/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017 nilai Rp 29987469 sebanyak 1 (satu) lembar.
425. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 137/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017 nilai Rp 20305335 sebanyak 1 (satu) lembar.
426. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 135/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017 nilai Rp 24732713 sebanyak 1 (satu) lembar.
427. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 134/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
428. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 145/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 26 Oktober 2017 nilai Rp 137906061 sebanyak 1 (satu) lembar.
429. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 162/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 09 November 2017 nilai Rp 67500000 sebanyak 1 (satu) lembar.
430. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 167/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 17 November 2017 nilai Rp 28673780 sebanyak 1 (satu) lembar.
431. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 169/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 17 November 2017 nilai Rp 23419024 sebanyak 1 (satu) lembar.



- lembar.
432. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 166/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 17 November 2017 nilai Rp 12223201 sebanyak 1 (satu) lembar.
433. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 168/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 17 November 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
434. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 171/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 17 November 2017 nilai Rp 11695823 sebanyak 1 (satu) lembar.
435. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 139/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 09 November 2017 nilai Rp 5000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
436. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 170/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 17 November 2017 nilai Rp 31101158 sebanyak 1 (satu) lembar.
437. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 175/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 29 November 2017 nilai Rp 130974858 sebanyak 1 (satu) lembar.
438. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 176/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 29 November 2017 nilai Rp 3681431 sebanyak 1 (satu) lembar.
439. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 179/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 05 Desember 2017 nilai Rp 32414847 sebanyak 1 (satu) lembar.
440. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 183/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 05 Desember 2017 nilai Rp 11695823 sebanyak 1 (satu) lembar.
441. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 182/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 05 Desember 2017 nilai Rp 12223201 sebanyak 1 (satu) lembar.
442. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 184/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 05 Desember 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 1 (satu) lembar.
443. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 180/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 05 Desember 2017 nilai Rp 23419024 sebanyak 1 (satu) lembar.
444. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 181/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 05 Desember 2017 nilai Rp 28673780 sebanyak 1 (satu) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 173/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 23 November 2017 nilai Rp 700000 sebanyak 1 (satu) lembar.
446. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 186/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 nilai Rp 12700000 sebanyak 1 (satu) lembar.
447. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 192/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 13 Desember 2017 nilai Rp 120000000 sebanyak 1 (satu) lembar.
448. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 177/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 19 Desember 2017 nilai Rp 1313689 sebanyak 1 (satu) lembar.
449. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 185/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 18 Desember 2017 nilai Rp 67500000 sebanyak 1 (satu) lembar.
450. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 199/LS-BTL/4.01.04.01/2017 tanggal 19 Desember 2017 nilai Rp 67500000 sebanyak 1 (satu) lembar.
451. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 211/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Rp 2220000 sebanyak 1 (satu) lembar.
452. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 212/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Rp 1350000 sebanyak 1 (satu) lembar.
453. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 209/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 19 Desember 2017 nilai Rp 1510000 sebanyak 1 (satu) lembar.
454. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 208/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 19 Desember 2017 nilai Rp 1170000 sebanyak 1 (satu) lembar.
455. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 210/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 19 Desember 2017 nilai Rp 1440000 sebanyak 1 (satu) lembar.
456. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 214/LS-BL/4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Rp 1390000 sebanyak 1 (satu) lembar.
457. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 01/SPP-LS/1.20.01.01/2017 tanggal 16 Januari 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 3 (tiga) lembar.
458. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 02/SPP-LS/

Halaman 94 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04.01.01.01/2017 tanggal 01 Februari 2017 nilai Rp 617690605
sebanyak 2 (dua) lembar.
459. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 03/SPP-LS/
4.01.01.01/2017 tanggal 28 Februari 2017 nilai Rp 617690605
sebanyak 2 (dua) lembar.
460. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 04/SPP-LS/
4.01.01.01/2017 tanggal 03 April 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 2
(dua) lembar.
461. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 05/SPP-LS/
4.01.01.01/2017 tanggal 02 Mei 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 2
(dua) lembar.
462. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 06/SPP-LS/
4.01.01.01/2017 tanggal 29 Mei 2017 nilai Rp 617690605 sebanyak 3
(tiga) lembar.
463. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 07/SPP-LS/
4.01.01.01/2017 tanggal 14 Juni 2017 nilai Rp 48004520 sebanyak 3
(tiga) lembar.
464. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 08/SPP-LS/
4.01.01.01/2017 tanggal 22 Juni 2017 nilai Rp 596340665 sebanyak 3
(tiga) lembar.
465. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 09/SPP-LS/
4.01.01.01/2017 tanggal 22 Juni 2017 nilai Rp 118878470 sebanyak 3
(tiga) lembar.
466. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 10/SPP-LS/
4.01.01.01/2017 tanggal 04 Agustus 2017 nilai Rp 593952145
sebanyak 3 (tiga) lembar.
467. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 11/SPP-LS/
4.01.01.01/2017 tanggal 05 September 2017 sebanyak 3 (tiga) lembar.
468. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 12/SPP-LS/
4.01.01.01/2017 tanggal 20 September 2017 nilai Rp 983100000
sebanyak 3 (tiga) lembar.
469. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 13/SPP-LS/
4.01.01.01/2017 tanggal 27 September 2017 nilai Rp 37355150
sebanyak 3 (tiga) lembar.
470. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 14/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 02 Oktober 2017 nilai Rp 1124490540
sebanyak 3 (tiga) lembar.
471. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 15/SPP-LS/
4.01.01.01/2017 tanggal 01 November 2017 nilai Rp 1113400065
sebanyak 3 (tiga) lembar.

Halaman 95 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 16/SPP-LS/4.01.01.01/2017 tanggal 30 November 2017 nilai Rp 1113400065 sebanyak 3 (tiga) lembar.
473. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 17/SPP-LS/4.01.01.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 nilai Rp 315000000 sebanyak 3 (tiga) lembar.
474. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 04/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 26 Januari 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
475. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 05/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 27 Januari 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
476. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 10/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp 31364268 sebanyak 1 (satu) lembar.
477. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 11/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp 24895823 sebanyak 1 (satu) lembar.
478. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 07/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp 26936890 sebanyak 3 (tiga) lembar.
479. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 09/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp 37791646 sebanyak 1 (satu) lembar.
480. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 08/SPP-IS/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp 59687469 sebanyak 1 (satu) lembar.
481. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 12/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Februari 2017 nilai Rp 49232713 sebanyak 1 (satu) lembar.
482. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 13/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 08 Februari 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
483. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 16/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 27 Februari 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
484. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 17/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 02 Maret 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
485. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 19/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Maret 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
486. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 20/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Maret 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
487. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 23/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Maret 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
488. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 24/SPP-LS/

Halaman 96 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.01.04.01/2017 tanggal 15 Maret 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
489. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 22/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 15 Maret 2017 nilai Rp 12495823 sebanyak 1
(satu) lembar.
490. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 21/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 15 Maret 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
491. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 25/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 27 Maret 2017 nilai Rp 131389600 sebanyak 3
(tiga) lembar.
492. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 29/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 05 April 2017 nilai Rp 67400000 sebanyak 1
(satu) lembar.
493. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 28/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 05 April 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
494. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 27/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 05 April 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
495. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 32/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 18 April 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
496. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 33/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 18 April 2017 nilai Rp 18991646 sebanyak 2
(dua) lembar.
497. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 36/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 18 April 2017 nilai Rp 15764268 sebanyak 2
(dua) lembar.
498. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 35/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 18 April 2017 nilai Rp 12495823 sebanyak 2
(dua) lembar.
499. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 31/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 18 April 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
500. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 34/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 18 April 2017 nilai Rp 24719024 sebanyak 2
(dua) lembar.
501. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 38/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 27 April 2017 nilai Rp 131389600 sebanyak 3
(tiga) lembar.
502. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 39/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 03 Mei 2017 nilai Rp 67400000 sebanyak 1
(satu) lembar.
503. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 43/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 18 Mei 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
504. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 46/SPP-LS/

Halaman 97 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.01.04.01/2017 tanggal 18 Mei 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
505. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 41/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 18 Mei 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
506. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 45/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 18 Mei 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
507. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 42/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 18 Mei 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
508. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 44/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 18 Mei 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
509. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 48/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 24 Mei 2017 nilai Rp 132308930 sebanyak 2
(dua) lembar.
510. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 49/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 06 Juni 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
511. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 58/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 15 Juni 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
512. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 51/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 14 Juni 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
513. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 54/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 15 Juni 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
514. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 52/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 14 Juni 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
515. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 56/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 14 Juni 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
516. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 55/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 15 Juni 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
517. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 53/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 14 Juni 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
518. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 59/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 15 Juni 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
519. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 62/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 22 Juni 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
520. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 65/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 12 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
521. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 66/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 19 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
522. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 70/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
523. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 71/SPP-LS/
4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
524. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 72/SPP-IS/
4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 98 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

525. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 73/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
526. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 69/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
527. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 68/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
528. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 76/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 26 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
529. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 82/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 28 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
530. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 83/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 04 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
531. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 90/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
532. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 89/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
533. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 91/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
534. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 92/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
535. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 93/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 15 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
536. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 98/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 22 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
537. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 97/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 21 Agustus 2017 nilai Rp 11095823 sebanyak 1 (satu) lembar.
538. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 106/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 23 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
539. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 110/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 08 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
540. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 115/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 25 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
541. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 118/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 26 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
542. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 116/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 25 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
543. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 113/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 25 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
544. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 114/SPP-LS/4.01.04.01/2017 tanggal 25 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
545. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 119/SPP-LS/

Halaman 99 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.01.04.01/2017 tanggal 26 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
546. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 120/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 27 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
547. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 126/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 06 Oktober 2017 nilai Rp 69250000 sebanyak 1 (satu) lembar.
548. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 132/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
549. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 136/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
550. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 133/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
551. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 137/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
552. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 135/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
553. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 134/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
554. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 145/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 26 Oktober 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
555. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 162/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 09 November 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
556. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 167/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 17 November 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
557. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 169/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 17 November 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
558. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 166/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 17 November 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
559. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 168/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 17 November 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
560. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 171/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 17 November 2017 nilai Rp 11695823 sebanyak 1 (satu) lembar.
561. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 139/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 19 Oktober 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
562. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 170/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 17 November 2017 nilai Rp 31101158 sebanyak 1 (satu) lembar.
563. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 175/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 29 November 2017 nilai Rp 130974858 sebanyak 1 (satu) lembar.
564. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 176/SPP-LS/

Halaman 100 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.01.04.01/2017 tanggal 29 November 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
565. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 179/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 05 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
566. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 183/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 05 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
567. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 182/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 05 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
568. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 184/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 05 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
569. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 180/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 05 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
570. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 181/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 05 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
571. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 173/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 23 November 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
572. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 186/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
573. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 192/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 13 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
574. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 177/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 19 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
575. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 185/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 12 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
576. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 199/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 19 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
577. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 211/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
578. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 212/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
579. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 209/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 19 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
580. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 208/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 19 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
581. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 210/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 19 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
582. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 214/SPP-LS/
- 4.01.04.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
583. Fotokopi Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 80.A/S-HP/XVIII.PPG/06/2018 tanggal 28 Juni 2018 sebanyak 3 (tiga) lembar.
584. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 di

Halaman 101 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pangkalpinang oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 80.C/LHP/XVIII.PPG/06/2018 tanggal 28 Juni 2018 sebanyak 1 (satu) set.
585. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang nomor 18 tahun 2016 tanggal 29 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) set.
586. Fotokopi Surat Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang nomor 900/829/SETWAN/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 hal Tindak Lanjut hasil Temuan BPK RI sebanyak 5 (lima) lembar.
587. Fotokopi Surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang nomor S-26129/WPJ.03/KP.06/2018 tanggal 14 Agustus 2018 hal Permintaan Keterangan Data Wajib Pajak sebanyak 4 (empat) lembar.
588. Fotokopi Surat Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang nomor 900/1038/SETWAN/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal PPh Pasal 21 yang harus disetor sebanyak 3 (tiga) lembar.
589. Fotokopi Surat Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang nomor 900/1074/SETWAN/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal Tanggapan atas Surat nomor: 900/1038/SETWAN/VIII/2018 sebanyak 1 (satu) lembar.
590. Fotokopi Surat Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang nomor 900/721/Setwan/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 perihal Penjelasan atas temuan BPK RI terhadap Bendahara Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang sebanyak 4 (empat) lembar.
591. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang nomor 22/KEP/BAKEUDA/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 sebanyak 1 (satu) set.
592. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang nomor 257/KEP/BAKEUDA/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Walikota Pangkalpinang nomor 22/KEP/BAKEUDA/I/2017 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan

Halaman 102 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2017 sebanyak 1 (satu) set.
593. Fotokopi Surat Penunjukan Bendahara Pengeluaran Sementara nomor : 800/1192/SETWAN/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
594. Fotokopi Formulir Setoran Bank Sumsel Babel nomor F-003/ISO/BSB/1/2014 tanggal 05-01-2018, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Rekening Koran Bank Sumsel Babel nomor rekening 1443010029 periode Januari 2018 sebanyak 1 (satu) set.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 9 Juni 2020 dan tertuang dalam Akta Nomor 6/Akta.Pid/2020 /PN. PGP;

Menimbang, bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara dan saksama kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 90/PID.B/ 2020 / PN PGP pada tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 17 Juni 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Peradilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan terhadap Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara sebagaimana pendapat Ahli FATWA FURQANA. SE , MBA yang telah memberikan pendapatnya bahwa Kerugian Pendapatan Negara adalah Negara kehilangan penerimaan dari sektor perpajakan dan / atau pun negara tidak seharusnya membayar / mengeluarkan kelebihan pembayaran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak yang mengajukan restitusi;



- bahwa penjatuhan pidana denda dengan melakukan sita aset Terdakwa , pada hakekatnya disamping untuk memulihkan Kerugian Pendapatan Negara juga memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki diri Terdakwa agar tidak melakukan dan mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan tindak pidana lainnya
- Bahwa Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama tidak menyatakan, menetapkan maupun memerintahkan putusan tentang perampasan hartabenda sebagai pelaksana denda pajak sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 208 K/Pid.Sus/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa Pidana denda dalam Undang-undang Perpajakan pasal 39 (1) huruf I Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2000 berbeda dengan Pidana Denda . Pasal 10 huruf a – 1e Pasal 30 KUH Pidana.
- Bahwa Pidana Denda yang dijatuhkan dalam Undang-undang Tindak Pidana Perpajakan adalah bagian dari Pajak yang tidak disetorkan atau kurang disetorkan oleh Terdakwa yang merupakan Hak Negara, sedangkan denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a -1e jo pasal 30 KUH Pidana merupakan sanksi pidana yang ditetapkan langsung oleh pembuat undang-undang yang tidak berkaitan dengan kerugian negara.
- Bahwa penjatuhan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Perpajakan, agar dapat efektif dalam mengembalikan dan memulihkan kerugian negara sebaiknya disertai dengan penyitaan dan perampasan harta / aset / kekayaan Terdakwa baik berasal dari Tindak Pidana Perpajakan maupun berasal dari bukan tindak pidana perpajakan guna menutupi besarnya denda yang wajib dibayar oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Jaksa/Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDIK WAHYOEDI Bin HARSONO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor



16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIK WAHYOEDI Bin HARSONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda 2 (dua) kali Kerugian Pendapatan Negara (KPN) sebesar Rp355.496.640,00 (tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) = sebesar Rp710.993.280,00 (tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian di lelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan dan dengan perintah TERDAKWA tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan barang Bukti Nomor 54 (tetap terlampir dalam berkas perkara);
4. Menetapkan agar TERDAKWA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP, untuk Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 90/PID.B/2020/PN Pgp tanggal 10 Juni 2020 dan Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 90 /PID.B/2020/PN Pgp tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut umum maupun Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan haknya untuk mempelajari berkas sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas dari Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, untuk Jaksa / Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2020 dan untuk Terdakwa tertanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 90 / Pid. B/2020/PN Pgp Tanggal 4 Juni 2020, Memori Banding dari Jaksa / Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 241 (1) KUHP Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 90/PID.B/2020 /PN Pgp tanggal 4 Juni 2020 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan sebagai perkara pidana umum dan bukan merupakan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa dalam Undang-undang Perpajakan hanya mengatur pidana badan dan pidana denda yang apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa Undang-undang Perpajakan tidak mengatur adanya uang pengganti dengan ancaman pidana penjara serta perampasan harta benda milik Terdakwa apabila tidak dibayar, sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 106 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan tentang pidana denda yang diterapkan adalah Pidana Denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a Jo Pasal 30 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Memori Banding Jaksa / Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 242 KUHP terhadap lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, adalah beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Pasal 193 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 90 /Pid. B/2020/PN.Pgp Tanggal 4 Juni 2020 atas nama Terdakwa BUDIK WAHYOEDI BIN HARSONO;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa BUDIK WAHYOEDI BIN HARSONO dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 107 dari 121 Putusan Nomor 30/ Pid/2020/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 oleh kami : ANNASTACIA TYAS E.E.N, SH , Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, LIAN HENRY SIBARANI,SH MH dan WAHYU SEKTIANINGSIH , SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 30/Pid /2020/PT BBL Tanggal 23 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SURYATI , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

LIAN HENRY SIBARANI,SH.,MH.

ANNASTACIA TYAS E.E.N,SH

WAHYU SEKTIANINGSIH, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

SURYATI

Salinan Resmi Sesuai Aslinya

Tanggal 14 Juli 2020

Panitera,

Halaman

id/2020/PT BBL

MAT DJUSKAN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)